LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS KESEHATAN KOTA BATAM 2024

Jl. Raja Haji No. 7 Sungai Harapan - Kecamatan Sekupang Kota Batam - Kepulauan Riau

(0778) 326887

dinkes.batam.go.id

dinkes@batam.go.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I	**PENDAHULUAN**	**HAL**
A.	Latar Belakang	6
B.	Landasan Hukum	7
C.	Maksud dan Tujuan	8
D.	Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi	10
E.	Isu Strategis	19
F.	Sistematika	20
BAB II	**PERENCANAAN KINERJA**	
1.1.	Rencana Strategis	22
A.	Telaah Visi Misi	23
B.	Tujuan dan Sasaran	24
C.	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	28
D.	Perencanaan Anggaran Tahun 2024	31
BAB III	**AKUNTABILITAS KINERJA**	
A.	Capaian Kinerja Organisasi	36
B.	Realisasi Anggaran	54
BAB IV	**PENUTUP**	
A.	Tinjauan Umum Keberhasilan	96
B.	Permasalahan atau Kendala	97
C.	Strategi Pemecahan Masalah	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Distribusi Sumber Daya Manusia Kesehatan Berdasarkan Jabatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Batam Tahun 2024	14
Tabel 1.2	Distribusi Sumber Daya Manusia Kesehatan Berdasarkan Jabatan di Lingkungan RSUD Embung Fatimah Kota Batam Tahun 2024	15
Tabel 1.3	Distribusi Sumber Daya Manusia Kesehatan Berdasarkan Pendidikan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Batam Tahun 2024	15
Tabel 1.4	Distribusi Sumber Daya Manusia Kesehatan Berdasarkan Pendidikan di Lingkungan RSUD Embung Fatimah Kota Batam Tahun 2024	16
Tabel 1.5	Distribusi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Batam Tahun 2024	16
Tabel 1.6	Distribusi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Lingkungan RSUD Embung Fatimah Kota Batam Tahun 2024	17
Tabel 1.7	Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Kota Batam Tahun 2024	18
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kota Batam	27
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Batam Tahun 2024	29
Tabel 2.3	Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Batam Tahun 2024	31
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Batam Tahun 2024	38
Tabel 3.2	Distribusi Kematian Ibu Tahun 2024	40
Tabel 3.3	Distribusi Kematian Neonatus Tahun 2024	41
Tabel 3.4	Distribusi Kematian Bayi Tahun 2024	43
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Batam	40
Tabel 3.6	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kota Batam	47

Tabel 3.7	Perbandingan Capaian Dinas Kesehatan Kota Batam dengan Standar Nasional	48
Tabel 3.8	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Batam	48
Tabel 3.9	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Batam	50
Tabel 3.10	Distribusi Realisasi Alokasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Batam Tahun 2024	55
Tabel 3.11	Checklist Kelengkapan Data Pada Bab III (Point Utama Penilaian LkjIP)	94

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, hanya berkat Ridho dan perkenan-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kesehatan Kota Batam Tahun 2024 dapat disusun dan selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Laporan ini merupakan hasil dedikasi serta upaya maksimal dari seluruh tim Dinas Kesehatan Kota Batam dalam menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan demi meningkatkan kesehatan masyarakat.

LKjIP ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sepanjang tahun 2024. Melalui laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian, tantangan, dan inovasi yang telah diimplementasikan guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kota Batam.

Laporan ini mencakup berbagai aspek kinerja Dinas Kesehatan, mulai dari pencapaian target dalam peningkatan cakupan pelayanan kesehatan, pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan, respons terhadap kondisi kesehatan masyarakat, hingga upaya peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam sektor kesehatan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, baik internal maupun eksternal Dinas Kesehatan Kota Batam.

Batam, 28 Februari 2025
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BATAM

Dr. DIDI KUSMARJADI, Sp.OG, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660731 199703 1 007

Ikhtisar Eksekutif

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kota Batam Tahun 2021-2026, Dinas Kesehatan Kota Batam senantiasa berupaya secara bertahap melakukan peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan kepada masyarakat Kota Batam. Pada Misi ke 3 Pembangunan Kota Batam yaitu Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berahlak Mulia, Dinas Kesehatan Kota Batam mempunyai tujuan meningkatkan aksesibilitas kualitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata.

Guna mewujudkan tujuan tersebut diatas, dirumuskan sasaran pembangunan kesehatan yakni:

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan dengan indikator sasarannya adalah :
    - Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)
    - Angka Kematian Neonatus (AKN) per 1.000 Kelahiran Hidup (KH)
    - Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup (KH)
    - Prevalensi Stunting pada Balita
    - Prevalensi Wasting pada Balita
    - Insidensi TB per 100.000 penduduk
    - Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada balita usia 12-23 bulan
    - Persentase Pencapaian SPM RS sesuai Standar
    - Bed of Rate (BOR) Rumah Sakit
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan dengan indikator sasarannya adalah:
    - Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan

Pada sasaran pembangunan kesehatan ini akan di implementasikan dalam sasaran program yang menjadi indikator kinerja jangka menengah dan tahunan Dinas Kesehatan Kota Batam yang mencakup indikator RPJMD, SDGs dan SPM bidang kesehatan Kota Batam.

Sasaran program dalam pembangunan kesehatan di Kota Batam tahun 2021-2026 adalah:

1. Meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan menyelenggarakan program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan indikator :
    a. Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan
    b. Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan
    c. Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan
    d. Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan
    e. Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan Kesehatan
    f. Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan
    g. Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan
    h. Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan
    i. Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan
    j. Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mendapat pelayanan kesehatan
    k. Persentase orang terduga Tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan
    l. Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) mendapat pelayanan kesehatan
    m. AVLOS (Average Length of Stay) Rumah sakit
    n. Persentase SPM Rumah Sakit yang mencapai target
2. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan indikator:
    a. Persentase Puskesmas memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai standar (Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Kesmas, Kesling, Gizi, Analis Kesehatan dan Kefarmasian) sesuai standar
    b. Indeks Kepuasan Masyarakat Rumah Sakit
3. Meningkatkan ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan meningkatkan pengawasan Makanan, dengan indikator :

a. Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Makanan yang memenuhi syarat dan ketentuan

4. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan lintas sektoral dalam pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat, dengan indikator:
   a. Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)
5. Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator adalah:
   a. Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan

Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan, mengacu pada Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program dan kegiatan yang digunakan mengacu pada rencana strategi Dinas Kesehatan yang telah disusun, sebagai berikut :

A. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
   1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota
   2. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota
   3. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
   4. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
B. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
   1. Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
   2. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota.
   3. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
C. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan
   1. Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan

Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

2. Kegiatan Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
3. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
4. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
5. Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
6. Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

D. Program Pemberdayaan Masyarakat
   1. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   2. Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
   3. Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

E. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   9. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut, kendala utama yang dihadapi antara lain :

1. Belum terpenuhinya sumber daya manusia kesehatan sesuai ketenagaan yang dibutuhkan baik jumlah dan kualitas khususnya 5 (lima) tenaga teknis (Kesehatan Masyarakat, Kesehatan lingkungan, Ahli Gizi, Kefarmasian dan Analis Kesehatan), distribusi tenaga tidak merata dan tidak sesuai dengan formasi kebutuhan
2. Kurangnya tenaga administrasi di Puskesmas sehingga banyak tenaga kesehatan (perawat, bidan, sanitarian, analis kesehatan dan gizi) merangkap tugas administrasi (bendahara dan administrasi lain), sehingga mengganggu tugas pokok sebagai tenaga fungsional kesehatan
3. Belum optimalnya sistem pencatatan dan pelaporan terutama fasilitas kesehatan swasta
4. Belum maksimalnya surveilans dan tata laksana terhadap balita bermasalah gizi, baik kasus gizi buruk, stunting dan wasting di beberapa wilayah kerja Puskesmas dikarenakan rendahnya peran serta masyarakat.

Adapun langkah-langkah untuk mengatasi masalah dimaksud, diantaranya adalah :

1. Melakukan advokasi pada *stakeholder* untuk mendapatkan dukungan penambahan tenaga, anggaran, sarana dan prasaranan kesehatan.
2. Penerapan PPK BLUD pada Puskesmas sehingga Puskesmas dapat mengatur kebutuhannya secara mandiri termasuk dalam pemenuhan tenaga non kesehatan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor dengan menggunakan sarana IT yang ada seperti *WhatsApp*, Email dan *zoom meeting* atau melaksanakan secara langsung dengan memperhatikan protokol kesehatan.
4. Penguatan peran serta masyarakat dengan pemberdayaan kader kesehatan sebagai perpanjangan tangan Puskesmas di lapangan.
5. Meningkatkan penggunaan system IT dalam pengelolaan pencatatan dan pelaporan.
6. Meningkatkan upaya promosi kesehatan untuk melakukan aktifitas/olah raga di rumah dan menjaga stamina.

7. Meningkatkan upaya surveilans kusta dengan mendeteksi kontak primer dan kontak tetangga dan pemberian pengobatan program kusta.
8. Menggunakan data yang ada untuk kasus gizi dan melanjutkan pemantauan gizi balita dengan mengoptimalkan fungsi kader di lapangan.
9. Meningkatkan upaya promosi kesehatan dengan pesan pesan kesehatan melalui spanduk, media elektronik, media komunikasi, seperti Whatapps, SMS, dll.
10. Meningkatkan kemitraan dengan pihak swasta dalam pencatatan dan pelaporan dengan memanfaatkan tenaga teknologi dan informasi.
11. Tetap menjaga dan memonitoring kesehatan lingkungan dan koordinasi secara *online*.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem kesehatan nasional, sebagai pilar penting dalam pembangunan suatu negara, menuntut adanya koordinasi dan sinergi dari seluruh komponen, termasuk instansi kesehatan di tingkat lokal. Dinas Kesehatan Kota Batam memainkan peran strategis dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat setempat, sekaligus berkontribusi dalam mewujudkan visi sistem kesehatan nasional yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pada Tahun 2024, kita berada di tengah-tengah transformasi sistem Kesehatan. Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatam sebagai penopang Kesehatan Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan Kesehatan primer; 2) Transformasi pelayanan Kesehatan rujukan; 3) Transfornasi sistem ketahanan Kesehatan; 4) Transformasi sistem pembiayaan Kesehatan; 5) Transformasi SDM Kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan. Kesehatan masyarakat menjadi sorotan utama, dan Dinas Kesehatan Kota Batam menjadi garda terdepan dalam menanggapi tantangan tersebut. Oleh karena itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 bukan sekadar dokumentasi, melainkan cerminan komitmen dan kontribusi nyata.

Dalam kerangka Sistem Kesehatan Nasional, pentingnya keterkaitan dan koordinasi antara tingkat nasional, regional, dan lokal menjadi jelas. Dinas Kesehatan Kota Batam diharapkan mampu menyelaraskan kebijakan dan programnya dengan prioritas nasional, seperti upaya peningkatan cakupan imunisasi, penanganan penyakit menular, dan penguatan kapasitas sistem kesehatan.

LKjIP Tahun 2024 menjadi wahana untuk memerinci langkah-langkah strategis yang diambil oleh Dinas Kesehatan Kota Batam dalam menyongsong masa depan. Evaluasi kinerja sepanjang tahun sebelumnya tidak hanya melibatkan pencapaian indikator lokal, tetapi juga sejauh mana kontribusi instansi ini terhadap pencapaian target nasional.

Peningkatan kualitas layanan kesehatan, penguatan sistem informasi kesehatan, dan peningkatan kualifikasi sumber daya manusia menjadi bagian integral dalam LKjIP ini. Sejalan dengan semangat pembangunan berkelanjutan, Dinas Kesehatan Kota Batam diharapkan dapat memberikan solusi inovatif dalam

mengatasi tantangan kesehatan, mempromosikan gaya hidup sehat, serta menciptakan sistem kesehatan yang mampu memberikan perlindungan optimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian, LKjIP Tahun 2024 bukan hanya menjadi laporan formal, melainkan menjadi karya kolaboratif yang merefleksikan semangat dan dedikasi Dinas Kesehatan Kota Batam dalam mendukung Sistem Kesehatan Nasional menuju arah yang lebih baik dan berkelanjutan.

B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Batam tahun 2024 didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan berikut ini

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraaan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Batam Tahun 2021- 2026;
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
19. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja Dinas Kesehatan Kota Batam;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Batam Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Kinerja
   - Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Dinas Kesehatan Kota Batam.
   - Menilai efektivitas dan efisiensi berbagai program dan kegiatan yang telah dijalankan selama tahun berjalan.

2. Akuntabilitas Publik

Memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait pengelolaan dana dan sumber daya yang telah diinvestasikan dalam upaya penyelenggaraan layanan kesehatan.

3. Perbaikan Berkelanjutan

- Mengidentifikasi kelemahan dan hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan program, serta merumuskan rekomendasi untuk perbaikan kontinu ke depan.
- Mendorong siklus perencanaan dan pelaksanaan yang adaptif untuk meningkatkan efektivitas strategi dan kebijakan kesehatan.

Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Batam Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Menyediakan informasi yang transparan mengenai pencapaian, tantangan, dan hambatan yang dihadapi selama tahun berjalan kepada masyarakat, pemangku kepentingan, dan lembaga terkait.

2. Pengambilan Keputusan

Memberikan data dan informasi yang akurat kepada pimpinan dan pengambil keputusan di Dinas Kesehatan, sehingga dapat dijadikan dasar untuk perumusan kebijakan yang lebih efektif dan efisien.

3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan

Menyajikan analisis kinerja yang mendalam untuk mendukung pengambilan keputusan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

4. Pemberdayaan Masyarakat

Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Batam dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan mereka, serta membangkitkan partisipasi aktif dalam program-program kesehatan.

5. Pengembangan Strategi Ke Depan

Menyediakan dasar untuk merumuskan strategi dan rencana aksi ke depan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika kesehatan

masyarakat, termasuk upaya penguatan keterkaitan dengan Sistem Kesehatan Nasional.

D. Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja Dinas Kesehatan Kota Batam, Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kepala Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan dan sumber daya kesehatan.
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan.
c. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan.
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan
e. Pelaksanaan administrasi dinas.

Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan Program; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional

c. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
d. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
e. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
f. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)
DINAS KESEHATAN KOTA BATAM

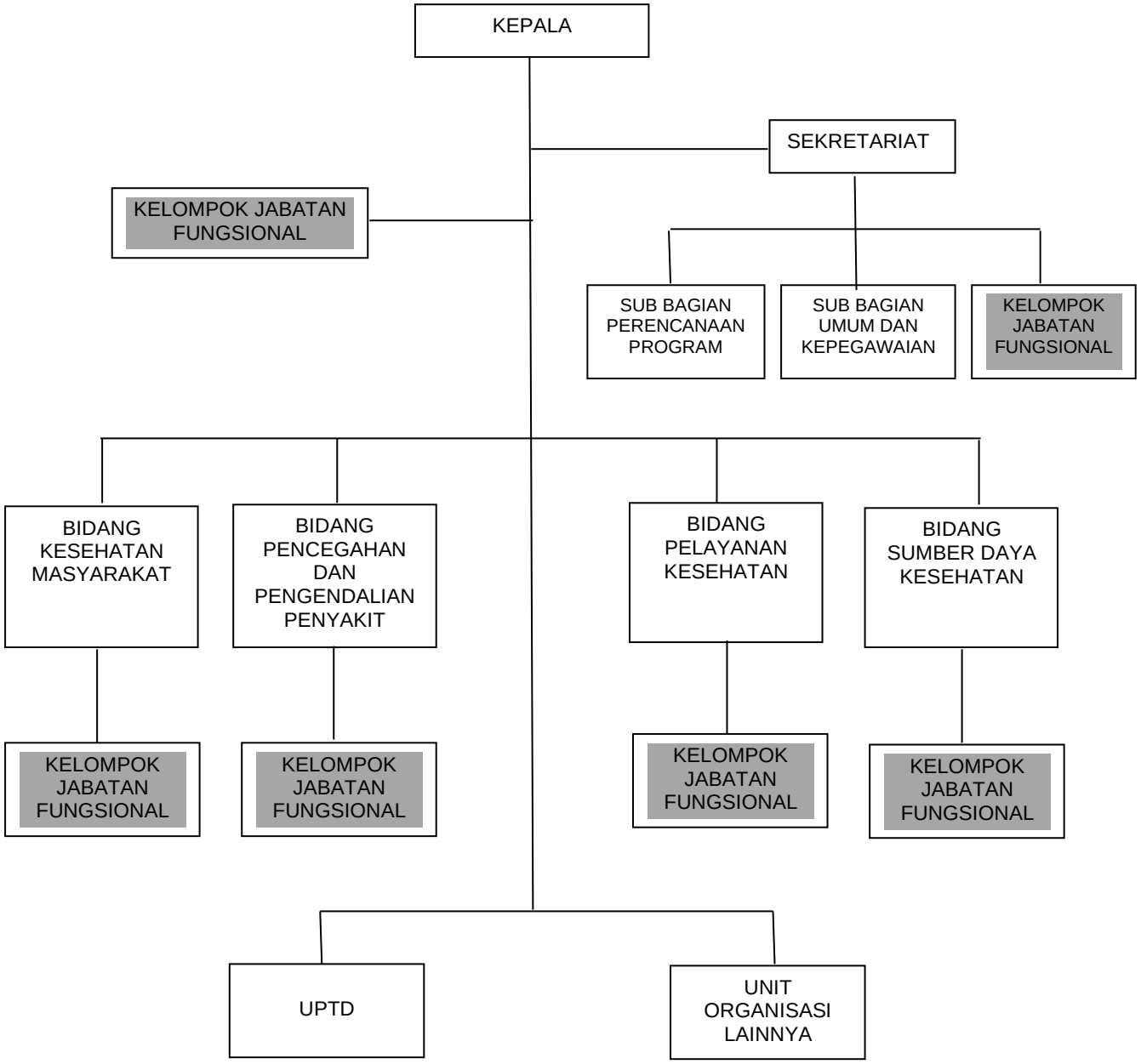

Sumber: Perwako Batam Nomor. 25 Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan teknis pelayanan kesehatan Kepala Dinas Kesehatan dibantu oleh 2 Kepala dan Kasubbag Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dan 21 Kepala Puskesmas dan Kasubbag Tata Usaha yang terdiri:

a. UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan
b. UPTD Labkesda
c. Puskesmas Batu Aji
d. Puskesmas Baloi Permai
e. Puskesmas Belakang Padang
f. Puskesmas Botania
g. Puskesmas Bulang
h. Puskesmas Galang
i. Puskesmas Kabil
j. Puskesmas Lubuk Baja
k. Puskesmas Sekupang
l. Puskesmas Sei.Pancur
m. Puskesmas Sei.Langkai
n. Puskesmas Sei.lekop
o. Puskesmas Sungai Panas
p. Puskesmas Sambau
q. Puskesmas Tanjung Sengkuang
r. Puskesmas Tiban Baru
s. Puskesmas Tanjung Buntung
t. Puskesmas Kampung Jabi
u. Puskesmas Rempang Cate
v. Puskesmas Tanjung Uncang
w. Puskesmas Mentarau

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Kota Batam didukung oleh sumber daya manusia berdasarkan formasi jabatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Batam terdiri dari jabatan struktural dan jabatan fungsional dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 1.1
DISTRIBUSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN BERDASARKAN JABATAN
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA BATAM TAHUN 2024

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	
	a. Bidang Sumber Daya Kesehatan	1
	b. Bidang Pelayanan Kesehatan	1
	c. Bidang Kesehatan Masyarakat	1
	d. Bidang Pencegahan Penyakit	1
4	Kepala Sub.bagian	2
5	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah	2
6	Kasubbag Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah	2
7	Kepala Puskesmas	20
8	Kasubbag Tata Usaha Puskesmas	21
9	Staf ASN PNS	
	a. Staf Golongan IV	81
	b. Staf Golongan III	579
	c. Staf Golongan II	111
	d. Staf Golongan I	1
10	Staf ASN PPPK	420
11	THD/Honor	
	a. PTT prov	8
	b. PTT Pusat	-
	c. DT PK	-
	d. THL	119
	e. Nakes dg Perjanjian Kerja	9
	f. Nakes Pustu Polindes	-
	TOTAL TENAGA	1381

Sumber : Sub Bag. Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Batam, 2024

TABEL 1.2

DISTRIBUSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN BERDASARKAN JABATAN
DI LINGKUNGAN RSUD EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM TAHUN 2024

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Direktur	1
2	Wadir Umum & Keuangan	1
3	Wadir Pelayanan Medik & Keperawatan	1
4	Kepala Bagian Umum	1
5	Kepala Bagian Program dan Kerjasama	1
6	Kepala Bagian Keuangan Rumah Sakit	1
7	Kepala Bidang Pelayanan Medik	1
8	Kepala Bidang Keperawatan	1
9	Kepala Bidang Penunjang Medik dan Non Medik	1
10	Staff Golongan ASN PNS	
	a. Staff Golongan IV	48
	b. Staff Golongan III	155
	c. Staff Golongan II	87
	d. Staff Golongan I	1
11	Staff Golongan ASN PPPK	208
12	THD / Honor / Tenaga BLUD	
	a. THD / Honor Pemko	5
	b. Tenaga BLUD Medis	19
	c. Tenaga BLUD Nakes	59
	d. Tenaga BLUD Non Kesehatan	159
	Total	**750**

TABEL 1.3

DISTRIBUSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN BERDASARKAN PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA BATAM TAHUN 2024

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Strata - 2 (S2)	25
2	Strata - 1 (S1)	491
3	Diploma - 4 (D4)	72
4	Diploma - 3 (D3)	654
5	Diploma - 1 (D1)	2
6	SMA Sederajat	108
7	SMP Sederajat	16

8	SD/MI Sederajat	12
	TOTAL TENAGA	1381

Sumber : Sub Bag. Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Batam, 2024

TABEL 1.4
DISTRIBUSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN BERDASARKAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN RSUD EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM TAHUN 2024

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	81
2	S1	203
3	DIV	24
4	DIII	349
5	DI	3
6	SMA SEDERAJAT	83
7	SMP	2
8	SD	5
	TOTAL TENAGA	750

TABEL 1.5
DISTRIBUSI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA BATAM TAHUN 2024

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Dokter	163
2	Dokter Gigi	40
3	Bidan	373
4	Tenaga Keperawatan	234
5	Tenaga Kesehatan Masyarakat	30
6	Tenaga Kesehatan Lingkungan	35
7	Tenaga Gizi	29
8	Ahli Tenaga Laboratorium Medik	29
9	Keteknisian Medis	50
10	Tenaga Teknik Kefarmasian	34
11	Apoteker	34
	TOTAL TENAGA	1051

Sumber : Bidang Sumber Daya Kesehatan, 2024

TABEL 1.6
DISTRIBUSI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN
RSUD EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM TAHUN 2024

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Dokter Sub Spesialis Akupuntur (K)	1
2	Dokter Sub Spesialis Bedah Konsultan Bedah Digestif	1
3	Dokter Sub Spesialis Bedah Onkologi (K)	1
4	Dokter Sub Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah (K)	1
5	Dokter Sub Spesialis Kandungan dan Kebidanan (K) FM	1
6	Dokter Sub Spesialis Radiologi (K)	1
7	Dokter Spesialis Akupuntur	1
8	Dokter Spesialis Anak	3
9	Dokter Spesialis Anestesi	3
10	Dokter Spesialis Bedah	6
11	Dokter Spesialis Bedah Saraf	1
12	Dokter Spesialis Forensik	2
13	Dokter Spesialis Gizi Klinik	2
14	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	2
15	Dokter Spesialis Jiwa	3
16	Dokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan	3
17	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik & Rehabilitasi	1
18	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	3
19	Dokter Spesialis Mata	2
20	Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatologi	3
21	Dokter Spesialis Paru	3
22	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	3
23	Dokter Spesialis Patologi Klinik	3
24	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	4
25	Dokter Spesialis Saraf	2
26	Dokter Spesialis Telinga Hidung dan Tenggorokan	2
27	Dokter Spesialis Urologi	1
28	Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut	1
29	Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi	2
30	Dokter Umum	27
31	Dokter Gigi	4
32	Apoteker	20
33	Asisten Apoteker	20
34	BDRS	5
35	Bidan	55
36	Epidemiologi	1
37	Fisikawan Medis	1

38	Fisioterapi	6
39	Nutrisionis	6
40	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama	1
41	Penata Anestesi	4
42	Perawat	247
43	Perekam Medis	8
44	Pranata Laboratorium Kesehatan	24
45	Radiografer	11
46	Sanitarian	2
47	Teknisi Elektromedis	5
48	Tenaga Terapis Gigi dan Mulut	5
	TOTAL	**514**

Sarana dan prasarana kesehatan yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Batam Tahun 2024 terdiri dari:

Tabel 1.7
JUMLAH SARANA DAN PRASARANA
DINAS KESEHATAN KOTA BATAM TAHUN 2024

NO	JENIS SARANA & PRASARANA	JUMLAH
1.	Rumah Sakit Umum	21
2.	Puskesmas	21
3.	Puskesmas Pembantu	63
4.	Polindes	26
5.	Poskesdes	14
6.	Ambulans	44
7.	Puskesmas Keliling Darat	7
8.	Puskesmas Keliling Laut	14

Sumber : Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Batam, 2024

Pada tahun 2024 Dinas Kesehatan Kota Batam dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan APBD Kota Batam, didukung anggaran sebesar Rp 525.054.617.979,00 dengan rincian sebagai berikut

a. Belanja Operasi : Rp 489.720.207.325,00

1) Belanja Pegawai : Rp. 284.481.222.081,00

2) Belanja Barang & Jasa : Rp. 204.038.985.244,00

3) Belanja Hibah	: Rp.	1.200.000.000,00
b. Belanja Modal	: Rp.	35.334.410.654,00

E. Isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, diantaranya adalah: Isu strategis dari dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi Kesehatan, Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah (RPJP dan RPJMD).

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan adalah kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan pada lima tahun mendatang. Faktor kesehatan masyarakat merupakan faktor penting dalam pelaksanaan program pembangunan. Kualitas kesehatan yang baik akan memberikan sumber daya manusia yang siap untuk melaksanakan pembangunan suatu negara. Penanganan kesehatan yang sinergis dengan faktor lingkungan menjadi penting mengingat bahwa pada pelaksanaannya upaya penanganan kesehatan disamping upaya kuratif berupa pengobatan setelah masyarakat terkena penyakit, ada pula upaya promotif dan preventif sebagai upaya peningkatan kualitas dan menjaga kesehatan masyarakat agar tidak mudah terjangkit penyakit.

Konsep penanganan kesehatan secara promotif dan preventif mendorong adanya pemahaman bahwa faktor kesehatan lingkungan merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Upaya peningkatan kualitas kesehatan lingkungan menjadi penting mengingat bahwa beberapa penyakit yang berjangkit luas pada warga masyarakat berawal dari rendahnya kualitas kesehatan lingkungan. Untuk itu diperlukan peningkatan layanan kesehatan promotif dalam bentuk peningkatan higienitas dan sanitasi lingkungan yang ruang lingkupnya meliputi penyediaan air bersih rumah tangga, metode pengelolaan dan pembuangan sampah, penanganan kotoran dan air limbah rumah tangga sehingga dapat dipahami bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya promotif yang harus dijalankan lintas sektoral. Upaya preventif juga promotif dalam konsep penanganan kesehatan adalah melalui kegiatan Posyandu yang menitikberatkan kepada penanganan kesehatan balita.

Di samping upaya promotif dan preventif tersebut di atas, upaya penting lain yang menjadi lini terdepan dalam isu kesehatan adalah upaya kuratif dan rehabilitatif, yaitu pelayanan kesehatan dalam bentuk pengobatan. Bentuk pelayanan kuratif tersedia melalui pelayanan Balai Pengobatan, Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), Klinik Kesehatan, dan sumah sakit.

Permasalahan lain yang mengemuka belum merata nya distribusi sumber daya manusia kesehatan di Puskesmas sesuai ketenagaan yang dibutuhkan baik jumlah dan kualitas khususnya 9 (sembilan) jenis tenaga yakni Dokter, Dokter gigi, Bidan, Perawat, Kesmas, Kesling, Gizi, Analis Kesehatan dan Kefarmasian. Kurangnya tenaga administrasi di Puskesmas sehingga banyak tenaga kesehatan (perawat, bidan, sanitarian, analis kesehatan dan gizi) merangkap tugas administrasi (bendahara dan administrasi lain), sehingga formasi tenaga fungsional yang ada tidak optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam jabatan fungsional.

Dari sisi penunjang pelayanan kesehatan, Sistem Data dan Informasi belum terintegrasi secara optimal sehingga tingkat validitas *evidence base* belum optimal. Selain itu, dikarenakan belum optimalnya sistem data dan informasi ini pun berpengaruh pada kualitas data yang diperlukan untuk merumuskan perencanaan pembangunan kesehatan yang baik.

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Batam Kota Batam Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran serta arah kebijakan program dan anggaran yang tertuang pada perjanjian kinerja tahun 2024 Dinas Kesehatan Kota Batam.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan tentang capaian kinerja, pengukuran kinerja, analisis capaian kinerja dan realisasi anggaran serta pemberdayaan sumber daya manusia dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Batam selama Tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1.1 Rencana Strategis

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta hasil reviu atas Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Batam adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Batam. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Batam yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Wali Kota Batam terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Batam dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Kesehatan Kota Batam tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Batam telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kota Batam merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Kesehatan Kota Batam dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Kesehatan Kota Batam tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Batam yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Kesehatan Kota Batam dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

A. Telaah Visi dan Misi

Visi Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Batam tahun 2021-2026 merupakan dari visi dan misi sekaligus janji politik Walikota dan Wakil Walikota terpilih, dengan visi "**Terwujudnya Batam sebagai bandar dunia madani yang modern dan sejahtera**". Untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkan 5 (lima) misi dalam penyelenggaraan pemerintah Kota Batam pada tahun 2021- 2026, adapun misi tersebut adalah :

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah
2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.
3. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia
4. Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Berkenaan dengan visi-misi Wali kota Batam tersebut, maka Dinas Kesehatan mengacu pada misi ke tiga yakni "**Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia**", yang bertujuan untuk membangun manusia yang unggul, dan bertaqwa menuju masyarakat yang adil dan sejahtera dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM memiliki 3 (tiga) dimensi dasar yang mencakup indeks Pendidikan, indeks Kesehatan dan indeks pengeluaran. Dimensi Indeks Kesehatan dilhat dari umur Panjang dan hidup sehat dan diukur dari usia harapan hidup.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/Tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk

mencapai Visi dan Misi Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 sebanyak 4 sasaran strategis.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan menggambarkan indikator kinerja pada seluruh sasaran, dalam mencapai keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Kesehatan Kota Batam sebagai berikut :

1. Tujuan

   Dalam mendukung Misi Ke 3 Wali Kota Batam yaitu Mewujudkan SDM yang berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berahlak Mulia, Dinas Kesehatan mempunyai tujuan, yaitu :

   a. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau dan merata

2. Sasaran

   Adapun sasaran yang hendak dicapai periode 2021-2026 adalah :

   a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan

   b. Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan

3. Kebijakan

   Prioritas Pembangunan Kesehatan pada tahun 2021-2026, difokuskan pada 23 (dua puluh tiga) fokus prioritas kebijakan yaitu :

   a. Peningkatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
   b. Peningkatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan
   c. Peningkatan pelayanan jaminan persalinan bagi keluarga tidak mampu
   d. Peningkatan pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) melalui pembayaran premi BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah Bagi Masyarakat Miskin.
   e. Peningkatan Fasilitasi Kesehatan yang mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (*Health Tourism*).

f. Peningkatan jaminan kesehatan bagi penderita Covid-19
g. Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
h. Peningkatan Penerbitan izin RS Kelas C
i. Peningkatan izin Praktik Tenaga Kesehatan
j. Peningkatan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM
k. Peningkatan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan
l. Peningkatan insentif tenaga medis.
m. Peningkatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) sesuai standar dan ketentuan
n. Peningkatan Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Tangga
o. Peningkatan Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga sesuai standar dan ketentuan
p. Peningkatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)
q. Peningkatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
r. Peningkatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
s. Peningkatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor
t. Peningkatan Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif
u. Peningkatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM)
v. Terlaksananya urusan penunjang pemerintah.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kota Batam

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau dan merata		Indeks Kesehatan		82,12 Indeks	82,19 Indeks	82,26 Indeks	82,33 Indeks
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)	145 per 100.000 KH	64 per 100.000 KH	63 per 100.000 KH	62 per 100.000 KH	61 per 100.000 KH
			Angka Kematian Neonatus (AKN) per 1.000 Kelahiran Hidup (KH)		3,3 per 1.000 KH	3,2 per 1.000 KH	3,1 per 1.000 KH	3 per 1.000 KH
			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup (KH)	17 per 1000 KH	3,7 per 1000 KH	3,6 per 1000 KH	3,5 per 1000 KH	3,4 per 1000 KH
			Prevalensi Stunting pada Balita	8,5%	7%	6,7%	6,5%	6,2%
			Prevalensi Wasting pada Balita	0,75%	4,94%	4,9%	4,8%	4,7%
			Insidensi TB per 100.000 penduduk		180 per 100.000 penduduk	177 per 100.000 penduduk	175 per 100.000 penduduk	173 per 100.000 penduduk
			Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada Balita Usia 12-23 Bulan		93%	93,5%	94%	95%
			Persentase Pendapaian SPM RS sesuai Standar		92%	95%	98%	98%
			Bed of Rate (BOR) Rumah Sakit		77%	78%	79%	805
			Indeks Kepuasan Masyarakat RS		80%	85%	85%	90%

		Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan komitmen serta jaminan dari pemimpin instansi dalam lingkungan Pemerintahan, yang memiliki signifikansi besar dalam merencanakan kinerja tahunan. Proses ini menjadi sarana untuk menggambarkan dengan jelas apa yang diharapkan untuk dicapai. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi menjadi alat yang berharga untuk menentukan prioritas kegiatan dengan sumber dana yang terbatas. Dengan merancang perjanjian kinerja, diharapkan instansi dapat lebih fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan, sehingga tidak ada kegiatan yang terlupakan atau tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Batam Tahun 2024 merujuk pada dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kota Batam Tahun 2021-2026, Renja tahun 2024, dan DPA Tahun 2024. Dinas Kesehatan Kota Batam telah menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
Dinas Kesehatan Kota Batam Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
I	**TUJUAN :** **MENINGKATKAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG TERJANGKAU DAN MERATA**	**INDEKS KESEHATAN**	**82,33 INDEKS**
A	**Sasaran 1 :** **Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Kesehatan**	**Angka Kematian Ibu (AKI);**	**61 per 100.000 KH**
		Angka Kematian Neonatus (AKN);	**3,1 per 1.000 KH**
		Angka Kematian Bayi (AKB);	**3,4 per 1.000 KH**
		Prevalensi Stunting pada Balita;	**6,20%**
		Prevalensi Wasting pada Balita;	**4,70%**
		Insidensi TB;	**173 per 100.000 penduduk**
		Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada Balita Usia 12-23 Bulan;	**95%**
		Persentase Pendapaian SPM RS sesuai Standar;	**98%**
		Bed of Rate (BOR) Rumah Sakit;	**80%**
		Indeks Kepuasan Masyarakat RS.	**90%**
1	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan	Persentase Ibu Hamil mendapat Pelayanan Kesehatan;	100 %
		Persentase Ibu Bersalin mendapat Pelayanan Kesehatan;	100 %
		Persentase Bayi Baru Lahir mendapat Pelayanan Kesehatan;	100 %
		Persentase Balita mendapat Pelayanan Kesehatan;	100 %
		Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar mendapat Pelayanan Kesehatan;	100 %
			100 %

		Persentase Usia Produktif mendapat Pelayanan Kesehatan;	100 %
		Persentase Usia Lanjut mendapat Pelayanan Kesehatan;	100 %
		Persentase Penderita Hipertensi mendapat Pelayanan Kesehatan;	100 %
		Persentase Diabetes mendapat Pelayanan Kesehatan;	100 %
		Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mendapat Pelayanan Kesehatan;	100 %
		Persentase Orang terduga Tuberkulosis mendapat Pelayanan Kesehatan;	100 %
		Persentase Orang dengan Risiko terinfeksi Virus yang melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) mendapat Pelayanan Kesehatan;	5-8 Hari
		AVLOS (Average Length of Stay) Rumah sakit;	98%
		Persentase SPM Rumah Sakit yang mencapai target.	
2.	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas memiliki 9 jenis tenaga Kesehatan sesuai standar (Dokter, Dokter gigi, Bidan, Perawat, Kesmas, Kesling, Gizi, Analis Kesehatan dan Kefarmasian) sesuai standar.	90%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Rumah Sakit	90%
3	Meningkatnya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan Minuman	Persentase Fasilitas Kesehatan Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Makanan yang memenuhi syarat dan ketentuan.	70%

4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu, dan Posyandu Remaja).	25%
B.	**SASARAN II : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KESEKRETARIATAN**	**PERSENTASE TERPENUHINYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**100%**
5	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%

D. Perencanaan Anggaran Tahun 2024

Dari 2 (dua) sasaran dengan 10 indikator yang diperjanjikan didukung oleh jumlah Program sebanyak 5 (lima), 21 Kegiatan, dan 80 Sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran sebesar Rp. 525.054.617.979,-.

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Batam Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
DINAS KESEHATAN				**525.054.617.979**
1	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Persentase ibu hamil mendapat pelayanan Kesehatan** **Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan** **Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan** **Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan** **Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan** **Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan**	**100 %** **100 %** **100 %** **100 %** **100 %** **100 %** **100 %**	**120.734.981.398**

		Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan **Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan** **Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan** **Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mendapat pelayanan kesehatan** **Persentase orang terduga Tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan** **Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) mendapat pelayanan Kesehatan** **AVLOS (Average Length of Stay) Rumah sakit;** **Persentase SPM Rumah Sakit yang mencapai target**	**100 %** **100 %** **100 %** **100 %** **100 %** **5-8 Hari** **98%**	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar Persentase pelaksanaan fungsi Labkesda Tingkat Kab/Kota sesuai standar	21 60%	43.033.749.574
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan Kesehatan Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	77.440.880.824

		mendapat pelayanan kesehatan Persentase orang terduga Tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) mendapat pelayanan Kesehatan Persentase hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Cakupan UHC	100 % 100 % 60 % 95 %	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas menggunakan Sistem Informasi Terintegrasi	90 %	166.335.000
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan Terakreditasi	100 %	94.016.000
2	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Persentase Puskesmas memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai standar (Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Kesmas, Kesling, Gizi, Analis Kesehatan dan Kefarmasian) sesuai standar Indeks Kepuasan Masyarakat Rumah Sakit**	**90% 90%**	**809.120.000**
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas memiliki Sumberdaya Manusia Kesehatan (SDMK) sesuai standar	100%	134.192.000
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas memiliki kompetensi sesuai dengan standar telah memiliki sertifikat uji kompentensi	50%	674.928.000
3	**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Makanan yang memenuhi syarat dan ketentuan**	**70%**	**1.002.098.000**
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha	Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	22%	63.730.000

	Mikro Obat Tradisional (UMOT)	sesuai standar dan persyaratan		
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT yang sudah kaji	70%	246.387.000
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	5%	498.467.000
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang memenuhi syarat dan ketentuan	80%	193.514.000
4	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**Persentase Kelurahan denganminimal 80% posyandu aktif**	**25%**	**864.576.500**
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pedoman/ regulasi/ rekomendasi kebijakan penerapan Germas	40%	392.827.000
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan yang menerapkan Kebijakan Germas Persentase Rumah tangga berBPHS	70% 50%	269.075.000
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan dengan minimal 80% posyandu aktif	70%	202.674.500
5	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100%**	**401.643.842.081**

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	81.100.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	245.158.209.907
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.210.620.760
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	424.852.416
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	12.755.776.955
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	1.051.605.000
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100%	140.961.677.043

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
TAHUN 2024

Laporan kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan kinerja/pemberi amanah. Dinas Kesehatan Kota Batam selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berkinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Batam yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024 maupun Renja Tahun 2024 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pencapaian kinerja organisasi melibatkan tindakan manajemen, terutama dalam membandingkan tingkat kinerja yang telah dicapai dengan standar, rencana, atau target yang telah ditetapkan, menggunakan indikator kinerja yang telah diidentifikasi. Langkah ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana realisasi atau pencapaian kinerja yang berhasil diperoleh oleh Dinas Kesehatan Kota Batam selama periode Januari hingga Desember 2024.

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam laporan ini, Dinas Kesehatan Kota Batam dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kota Batam telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Keputusan Wali Kota Kota Batam Nomor: KPTS.108/HK/I/2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Batam Tahun 2022-2026. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja,

Dinas Kesehatan Kota Batam melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kota Batam tahun 2024 menunjukan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Batam Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Meningkatkan aksesiblitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata		**Indeks Kesehatan**	**82,33**	**83,65**	**101,60**	**Indeks**
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan	**Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)**	**61**	**72,58**	**81,02**	**Per 100.000 KH**
		Angka Kematian Neonatus (AKN) per 1.000 Kelahiran Hidup (KH)	**3,0**	**4,95**	**35**	**Per 1000 KH**
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup (KH)	**3,4**	**5,5**	**38,24**	**Per 1000 KH**
		Prevalensi Stunting pada Balita	**6,9**	**1,27**	**181,59**	**Persentase**
		Prevalensi Wasting pada Balita	**4,7**	**2,86**	**139,15**	**Persentase**
		Insidensi TB per 100.000 penduduk	**173**	**389**	**225**	**Per 100.000 Penduduk**
		Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada balita usia 12-23 bulan	**95**	**85**	**89,47**	**Persentase**
		Persentase Pencapaian SPM RS sesuai Standar	**98**	**87,50**	**89,29**	**Persentase**
		Bed of Rate (BOR) Rumah Sakit	**80**	**80,10**	**100,13**	**Persentase**
		Indeks Kepuasan masyarakat RS	**90**	**82**	**91,11**	**Persentase**
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100**	**97,87**	**97,87**	**Persentase**

Sumber Data: Pengukuran Kinerja TW IV Dinas Kesehatan Tahun 2024

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

a. Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan merupakan salah satu indikator kinerja Kepala Daerah

Kota Batam dalam mengukur capaian Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Kesehatan didasarkan pada kesehatan fisik, mental, infrastruktur kesehatan dan perawatan guna pencegahan berbagai wabah atau penyakit. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus yang diberikan oleh BPS Kota Batam Indeks Kesehatan Kota Batam pada tahun 2024 sebesar 83,65. Indeks Kesehatan tahun 2024 melampaui target yang telah ditetapkan didalam Renstra yaitu sebesar 82,33. Rumus yang dimaksud dalam perhitungan ini yaitu seperti dibawah ini :

$$I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

b. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu fokus utama dalam target prioritas nasional, dengan harapan pada tahun 2024 dapat mencapai angka kurang dari 61 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH). Pada tahun 2024, di Kota Batam, terdokumentasikan bahwa 17 ibu meninggal dari 23.423 kelahiran hidup, sehingga Angka Kematian Ibu mencapai 72,58 per 100.000 KH. Melalui hasil Audit Maternal Perinatal dan Pertemuan Pengkajian Kasus Kematian Maternal, diketahui bahwa dua penyebab utama kematian ibu adalah perdarahan dalam masa kehamilan dan pasca persalinan, serta hipertensi pada kehamilan. Selain itu, faktor-faktor penyebab komplikasi obstetri lainnya seperti KET (Kehamilan Ektopik Terganggu), infeksi, kelainan jantung dan pembuluh darah, serta faktor komplikasi non obstetri lainnya turut berkontribusi pada kematian ibu.

Tabel 3.2 Distribusi Kematian Ibu Tahun 2024

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	PENYEBAB KEMATIAN IBU					
			PERDARAHAN	GANGGUAN HIPERTENSI	INFEKSI	KELAINAN JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH*	LAIN-LAIN	JUMLAH KEMATIAN IBU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*12*	*13*
1	BELAKANG PADANG	PKM BELAKANG PADANG	0	0	0	0	0	0
2	SEKUPANG	PKM SEKUPANG	0	0	0	0	0	0
3	SEKUPANG	PKM TIBAN BARU	1	0	0	0	0	1
4	SEKUPANG	PKM MENTARAU	0	0	0	0	0	0
5	LUBUK BAJA	PKM LUBUK BAJA	0	0	0	0	0	0
6	BATU AMPAR	PKM TANJUNG SENGKUANG	2	0	0	0	0	2
7	BENGKONG	PKM SUNGAI PANAS	0	0	0	0	1	1
8	BENGKONG	PKM TANJUNG BUNTUNG	0	0	0	1	0	1
9	BATAM KOTA	PKM BALOI PERMAI	0	0	0	0	0	0
10	BATAM KOTA	PKM BOTANIA	1	0	0	0	0	1
11	NONGSA	PKM SAMBAU	0	0	0	0	0	0
12	NONGSA	PKM KABIL	1	0	0	0	0	1
13	NONGSA	PKM KAMPUNG JABI	0	0	0	0	2	2
14	BATU AJI	PKM BATU AJI	2	1	0	0	0	3
15	BATU AJI	PKM TANJUNG UNCANG	1	0	1	0	0	2
16	SAGULUNG	PKM SEI LANGKAI	0	1	0	0	1	2
17	SAGULUNG	PKM SEI LEKOP	1	0	0	0	0	1
18	SEI BEDUK	PKM SEI PANCUR	0	0	0	0	0	0
19	BULANG	PKM BULANG	0	0	0	0	0	0
20	GALANG	PKM GALANG	0	0	0	0	0	0
21	GALANG	PKM REMPANG CATE	0	0	0	0	0	0
JUMLAH			9	2	1	1	4	17

Sumber Data: Dapur Profile Dinas Kesehatan Kota Batam Tahun 2024

c. Angka Kematian Neonatus

Angka Kematian Neonatus (AKN) menggambarkan jumlah kematian bayi baru lahir hingga usia 28 hari. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 116 neonatus mengalami kematian, dengan Angka Kematian Neonatus mencapai 4,95 per 1000 kelahiran hidup. Faktor utama yang menyebabkan kematian neonatus meliputi Asfiksia, Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), kelainan kongenital, dan infeksi.

Tabel 3.3. Distribusi Kematian Neonatus Tahun 2024

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	PENYEBAB KEMATIAN NEONATAL (0-28 HARI)							
			BBLR DAN PREMATURITAS	ASFIKSIA	TETANUS NEONATORUM	INFEKSI	KELAINAN KONGENITAL	COVID-19	KELAINAN CARDIOVASKULAR DAN RESPIRATORI	LAIN-LAIN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	BELAKANG PADANG	PKM BELAKANG PADANG	0	1	0	0	0	0	0	0
2	SEKUPANG	PKM SEKUPANG	2	1	0	0	1	0	0	1
3	SEKUPANG	PKM TIBAN BARU	2	3	0	1	0	0	0	3
4	SEKUPANG	PKM MENTARAU	3	4	0	0	0	0	0	1
5	LUBUK BAJA	PKM LUBUK BAJA	2	1	0	0	1	0	0	0
6	BATU AMPAR	PKM TANJUNG SENGKUANG	3	1	0	1	1	0	0	1
7	BENGKONG	PKM SUNGAI PANAS	2	1	0	0	1	0	0	1
8	BENGKONG	PKM TANJUNG BUNTUNG	0	1	0	2	0	0	0	0
9	BATAM KOTA	PKM BALOI PERMAI	1	2	0	0	0	0	0	2
10	BATAM KOTA	PKM BOTANIA	4	7	0	1	0	0	0	1
11	NONGSA	PKM SAMBAU	0	1	0	0	0	0	0	0
12	NONGSA	PKM KABIL	2	2	0	1	0	0	0	1
13	NONGSA	PKM KAMPUNG JABI	2	1	0	0	0	0	0	2
14	BATU AJI	PKM BATU AJI	3	1	0	0	1	0	0	0
15	BATU AJI	PKM TANJUNG UNCANG	2	3	0	0	1	0	0	1
NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	PENYEBAB KEMATIAN NEONATAL (0-28 HARI)							
			BBLR DAN PREMATURITAS	ASFIKSIA	TETANUS NEONATORUM	INFEKSI	KELAINAN KONGENITAL	COVID-19		LAIN-LAIN

									KELAINAN CARDIOVASKULAR DAN RESPIRATORI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
16	SAGULUNG	PKM SEI LANGKAI	4	5	0	0	2	0	0	2
17	SAGULUNG	PKM SEI LEKOP	2	4	0	0	2	0	0	1
18	SEI BEDUK	PKM SEI PANCUR	1	1	0	0	2	0	0	1
19	BULANG	PKM BULANG	1	0	0	0	0	0	0	3
20	GALANG	PKM GALANG	0	1	0	0	0	0	0	0
21	GALANG	PKM REMPANG CATE	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH			36	41	0	6	12	0	0	21

Sumber Data: Dapur Profile Dinas Kesehatan Kota Batam Tahun 2024

d. Angka Kematian Bayi

Kematian bayi, yang merujuk pada kehilangan nyawa anak di bawah usia satu tahun, menjadi sorotan penting di Kota Batam. Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2024 mencapai 5,5 per 1.000 Kelahiran Hidup (129 kematian bayi), melebihi target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam 2024, yaitu 3,4 per 1.000 KH.

Fakta ini mencerminkan bahwa Kota Batam masih memiliki tantangan untuk menurunkan angka kematian bayi sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perlu peningkatan upaya promotif dan preventif, seperti pelaksanaan kelas ibu hamil dan kelas ibu balita, serta memperkuat akses jaminan pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin melalui program Jamkesda. Upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi dilaksanakan melalui program inovasi GEMA CEK IDA (Gerakan Bersama Cegah Kematian Ibu dan Anak) yang dilakukan dalam bentuk pertemuan bulanan (*Zoom Meeting*) bekerja sama dengan organisasi profesi seperti IDAI, POGI, dan IBI. Sasaran dari program inovasi ini adalah seluruh Fasyankes yang melayani ANC, INC, dan kesehatan ibu dan anak Upaya bersama lintas sektor dan partisipasi masyarakat juga menjadi kunci untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ibu dan bayi.

Tabel 3.4. Distribusi Kematian Bayi Tahun 2024

NO	PUSKESMAS	JUMLAH KEMATIAN BAYI
1	PKM BELAKANG PADANG	1
2	PKM SEKUPANG	5
3	PKM TIBAN BARU	10
4	PKM MENTARAU	8
5	PKM LUBUK BAJA	5
6	PKM TANJUNG SENGKUANG	7
7	PKM SUNGAI PANAS	6
8	PKM TANJUNG BUNTUNG	4
9	PKM BALOI PERMAI	6
10	PKM BOTANIA	14
11	PKM SAMBAU	1
12	PKM KABIL	6
13	PKM KAMPUNG JABI	5
14	PKM BATU AJI	8
15	PKM TANJUNG UNCANG	7
16	PKM SEI LANGKAI	14
17	PKM SEI LEKOP	10
18	PKM SEI PANCUR	5
19	PKM BULANG	5
20	PKM GALANG	2
21	PKM REMPANG CATE	0
JUMLAH		129
ANGKA KEMATIAN (DILAPORKAN)		**5.5**

e. Prevalensi Stunting Pada Balita

Capaian prevalensi stunting pada balita di Kota Batam pada tahun 2024 yang sebesar 1,27% merupakan pencapaian luar biasa yang menandakan keberhasilan dalam menekan angka stunting pada anak-anak usia dini. Angka ini jauh di bawah target yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu 6,2% pada tahun yang sama. Peningkatan kesadaran masyarakat, program gizi berupa pemberian makanan tambahan (PMT Bumil KEK), edukasi tentang pola makan yang seimbang, dan upaya kesehatan masyarakat yang terkoordinasi dapat menjadi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan ini. Capaian ini tidak hanya mencerminkan kesuksesan dalam upaya pencegahan stunting, tetapi juga mencerminkan komitmen dan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat. Penting untuk terus mempertahankan dan

meningkatkan upaya-upaya ini guna memastikan bahwa capaian yang baik ini dapat berlanjut dan menjadi dasar untuk peningkatan kualitas hidup generasi masa depan di Kota Batam.

f. Prevalensi Wasting Pada Balita

Capaian prevalensi wasting pada balita di Kota Batam pada tahun 2024 sebesar 2,86% menandakan keberhasilan signifikan dalam menekan angka wasting pada anak-anak usia dini. Capaian ini merupakan pencapaian positif yang mengungkapkan upaya yang berhasil dilakukan oleh berbagai pihak di Kota Batam untuk mengatasi masalah wasting pada balita. Perlu dicatat bahwa capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu 4,7% pada tahun 2024. Keberhasilan ini dapat dikaitkan dengan implementasi program gizi berupa pelaksanaan pemberian makanan tambahan (PMT Lokal) pada balita gizi kurang, edukasi tentang pola makan seimbang, serta upaya kesehatan masyarakat yang proaktif. Penting untuk terus memonitor dan meningkatkan langkah-langkah pencegahan dan intervensi guna menjaga capaian ini dan mencegah kenaikan angka wasting di masa depan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat akan terus menjadi kunci keberhasilan dalam upaya menjaga kesehatan dan kesejahteraan balita di Kota Batam.

g. Insidensi TB per 100.000 penduduk

Insidensi Tuberkulosis (TB) yang mencapai 389 per 100.000 penduduk di Kota Batam pada tahun 2024, melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 173 per 100.000 penduduk. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan temuan kasus TB di Kota Batam. Saat ini pemerintah pusat sedang melaksanakan upaya penanggulangan TBC untuk mewujudkan target eliminasi TB tahun 2030. Target penemuan kasus TB di kota Batam sesuai dengan target nasional adalah sebanyak 90% dari total 7431 kasus. Oleh karena itu dilaksanakan berbagai upaya untuk memenuhi target nasional meliputi kegiatan skrining pada kelompok beresiko (HIV, DM, warga binaan, asrama tempat tinggal, masyarakat dengan pemukiman kumuh padat dan kumuh miskin), investigasi kontak serumah dengan kasus indeks TB, investigasi kontak erat dengan kasus indeks TB.

h. Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada balita usia 12-23 bulan

Capaian persentase Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada balita usia 12-23 bulan di Kota Batam tahun 2024 sebesar 85%, di bawah target sebesar 95%, mencerminkan adanya penurunan cakupan IDL pada tahun sebelumnya. Faktor-faktor penyebab penurunan ini melibatkan kurangnya pengetahuan orangtua tentang

imunisasi lanjutan setelah menyelesaikan imunisasi rutin pada bayi, kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya melanjutkan vaksinasi, dan kendala dalam pencatatan dan pelaporan. Untuk meningkatkan capaian imunisasi dan mengatasi hambatan tersebut, beberapa langkah percepatan dapat diambil:

1. Penguatan Edukasi Masyarakat

   Melakukan kampanye edukasi yang intensif kepada masyarakat tentang pentingnya imunisasi lanjutan pada anak usia di bawah dua tahun (baduta). Memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami dapat meningkatkan kesadaran orangtua.

2. Pemberian Layanan Imunisasi di Fasilitas Kesehatan Swasta

   Melibatkan faskes swasta dengan membentuk jejaring di wilayah kerja Puskesmas masing-masing. Hal ini dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan imunisasi.

3. Penjadwalan Layanan Imunisasi di Puskesmas

   Membuka layanan imunisasi di Puskesmas secara terjadwal setiap bulannya, memberikan kemudahan bagi orangtua untuk membawa anak mereka secara rutin.

4. Peningkatan Pencatatan dan Pelaporan

   Memastikan pencatatan pelaksanaan imunisasi dilakukan secara baik dan teratur. Data pelaporan imunisasi didapatkan dari Rumah Sakit dan Dokter Praktik Mandiri (DPM) spesialis anak. Pengumpulan data dilakukan secara teratur setiap bulan ke Dinas Kesehatan bidang P2P, yang selanjutnya akan dibagikan ke Puskesmas sesuai wilayah kerja untuk kemudian diinput ke aplikasi ASIK. Untuk pencatatan dan pelaporan Puskesmas menggunakan aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) sejak 1 Januari 2024 sehingga dapat membantu memperbaiki dan menyederhanakan proses pencatatan serta memudahkan pemantauan capaian imunisasi.

5. Monitoring dan Evaluasi

   Monitoring dilakukan oleh Bidang P2P melalui aplikasi ASIK. Hasil monitoring diberikan ke Puskesmas setiap hari Kamis agar dapat ditindak lanjuti oleh Puskesmas.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan dapat memperbaiki capaian imunisasi di Kota Batam dan memberikan perlindungan optimal terhadap kesehatan anak-anak dalam masyarakat.

i. Persentase Pencapaian SPM RS sesuai standar

Persentase pencapaian SPM di RSUD Embung Fatimah sesuai standar pada tahun 2024 sebesar 87,50%, capaian ini kurang dari target yang telah ditetapkan yaitu 98%.

j. Bed of Rate (BOR) Rumah Sakit

Persentase capaian Bed of Rate (BOR) Rumah Sakit RSUD Embung Fatimah sudah mencapai target yakni sebesar 80,1% dibanding target yang telah ditetapkan yaitu 80%.

k. Indeks Kepuasan Masyarakat RS

Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD embung Fatimah masih di bawah target yang ditetapkan yaitu 90% sedangkan capaian pada tahun 2024 adalah 91,11%.

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Batam

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2022			2023			2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	3				4	5	6			
Meningkatkan aksesiblitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata	Indeks Kesehatan	82,19	82,49	100,36	82,26	82,49	100,27	82,33	83,65	101,60
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)	63	62,89	100,17	62	84	64,51	61	72,58	81,02
	Angka Kematian Neonatus (AKN) per 1.000 Kelahiran Hidup (KH)	3,2	2,31	127,81	3,1	3,42	89,67	3,0	4,95	35
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup (KH)	3,6	2,96	117,77	3,5	3,7	94,28	3,4	5,5	38,24
	Prevalensi Stunting pada Balita	7,1	2,42	165,91	6,5	1,71	173,69	6,9	1,27	181,59
	Prevalensi Wasting pada Balita	4,9	2,93	140,20	4,8	2,82	141,25	4,7	2,86	139,15
	Insidensi TB per 100.000 penduduk	177	219	123,72	175	261	149,14	173	389	225
	Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada balita usia 12-23 bulan	93,5	79,8	85,34	94	69,19	73,60	95	85	89,47

	Persentase Pencapaian SPM RS sesuai Standar	92	93	101,08	95	96,8	101,89	98	87,50	89,29
	Bed of Rate (BOR) Rumah Sakit	78	66	84,61	79	89	112,65	80	80,10	100,13
	Indeks Kepuasan masyarakat RS	85	85	100	85	86,2	101,41	90	82	91,11
Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100	98,99	98,99	100	98,1	98,10	100	97,87	99,21

Tabel 3.6
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis
Dinas Kesehatan Kota Batam

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET AKHIR 2026	TINGKAT KEMAJUAN
1	3			
Meningkatkan aksesiblitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata	Indeks Kesehatan	83,65	82,47	101,43
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)	72,58	60	79.03
	Angka Kematian Neonatus (AKN) per 1.000 Kelahiran Hidup (KH)	4,95	2,8	23,21
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup (KH)	5,5	3,2	28,13
	Prevalensi Stunting pada Balita	1,27	5,8	178,10
	Prevalensi Wasting pada Balita	2,86	4,5	136,44
	Insidensi TB per 100.000 penduduk	389	165	235,76
	Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada balita usia 12-23 bulan	85	95	89,47
	Persentase Pencapaian SPM RS sesuai Standar	87,50	100	87,50
	Bed of Rate (BOR) Rumah Sakit	80,10	82	97.68
	Indeks Kepuasan masyarakat RS	82	92	89,13
Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	97,87	100	97,87

Tabel 3.7

Perbandingan Capaian Dinas Kesehatan Kota Batam dengan Standar Nasional

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2024	STANDAR NASIONAL	TINGKAT KEMAJUAN
1	3			
Meningkatkan aksesiblitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata	Indeks Kesehatan	83,65		
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)	72,58	183	160,34
	Angka Kematian Neonatus (AKN) per 1.000 Kelahiran Hidup (KH)	4,95	10	150,50
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup (KH)	5,5	16	165,63
	Prevalensi Stunting pada Balita	1,27	14	190,93
	Prevalensi Wasting pada Balita	2,86	7	159,14
	Insidensi TB per 100.000 penduduk	389	387	100,52
	Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada balita usia 12-23 bulan	85	95	89,47
	Persentase Pencapaian SPM RS sesuai Standar	87,50	100	87,50
	Bed of Rate (BOR) Rumah Sakit	80,10	60-85	100
	Indeks Kepuasan masyarakat RS	82	90	91,11
Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	97,87	100	97,87

Tabel 3.8
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Batam

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	3	4	5	6	7	
Meningkatkan aksesiblitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata	Indeks Kesehatan	82,33	83,65	101,60		

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan	**Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)**	**61**	**72,58**	**81,02**	**- Kesadaran masyarakat untuk ANC sesuai standar masih kurang -Sistem rujukan yang mengakibatkan keterlambatan penanganan**	**-Program inovasi GEMA CEK IDA -Pertemuan koordinasi dengan RS terkait sistem rujukan**
	Angka Kematian Neonatus (AKN) per 1.000 Kelahiran Hidup (KH)	**3,0**	**4,95**	**35**	**-Kesadaran masyarakat untuk melakukan kunjungan neonatus di faskes -Kurangnya kompetensi petugas dalam tata laksana gadar matneo -Kurangnya sarana untuk pertolongan pertama gadar matneo**	**-Program inovasi GEMA CEK IDA -Peningkatan kompetensi nakes -Pengadaan alkes dan BMHP sesuai kebutuhan Puskesmas**
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup (KH)	**3,4**	**5,5**	**37,94**	**- Kurangnya kompetensi petugas dalam tata laksana gadar matneo -Kurangnya sarana untuk pertolongan pertama gadar matneo**	**-Peningkatan kompetensi nakes -Pengadaan alkes dan BMHP sesuai kebutuhan Puskesmas**
	Prevalensi Stunting pada Balita	**6,9**	**1,27**	**180,16**	**-Dukungan lintas sektor -Penemuan dan deteksi dini kasus yang semakin baik -Keberhasilan intervensi spesifik dan sensitive stunting**	**-Edukasi kepada masyarakat agar semakin proaktif -Pelaksanaan penemuan kasus dan deteksi dini di Puskesmas**
	Prevalensi Wasting pada Balita	**4,7**	**2,86**	**164,26**	**-Meningkatnya pengetahuan orang tua -Deteksi dini dan tata laksana pada balita bermasalah gizi**	**-Pelaksanaan pemantauan pertumbuhan balita di Puskesmas**
	Insidensi TB per 100.000 penduduk	**173**	**389**	**225**	**Tata laksana penemuan kasus TB yang sesuai standar di seluruh wilayah kerja Puskesmas**	**Skrining ke tempat berisiko, investigas kontak serumah, investigasi kontak erat**
	Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada balita usia 12-23 bulan	**95**	**85**	**89,47**	**-Kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya imunisasi -Belum optimalnya pencatatan dan pelaporan**	**-Penguatan edukasi masyarakat -Pemberian imunisasi di faskes swasta -Penjadwalan imunisasi di Puskesmas -Peningkatan pencatatan dan pelaporan melalui aplikasi ASIK -Monev oleh Dinas Kesehatan bidang**

						P2P setiap hari Kamis
	Persentase Pencapaian SPM RS sesuai Standar	98	87,50	89,29		
	Bed of Rate (BOR) Rumah Sakit	80	80,10	100,13		
	Indeks Kepuasan masyarakat RS	90	82	91,11		
Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	100	97,87	97,87	Koordinasi, sinergi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan	-Penyusunan perencanaan sesuai tahapan perencanaan pembangunan daerah -Penatausahaan keuangan sesuai prosedur

Tabel 3.9
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Batam

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	MENUNJANG/TIDAK MENUNJANG
1				2	3	4	5
	Meningkatkan aksesiblitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata	Indeks Kesehatan	101,60				
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)	81,02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan Kesehatan	97,90	
					Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	96,88	
		Angka Kematian Neonatus (AKN) per 1.000 Kelahiran Hidup (KH)	35		Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan	97,83	
					Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	98,51	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup (KH)	38,24		Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan	99,94	
					Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	87	
		Prevalensi Stunting pada Balita	181,59		Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan	100	
		Prevalensi Wasting pada Balita	139,15		Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	100	
		Insidensi TB per 100.000 penduduk	225		Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan	100	

		Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada balita usia 12-23 bulan **Persentase Pencapaian SPM RS sesuai Standar** **Bed of Rate (BOR) Rumah Sakit**	**89,47** **89,29** **100,13**		**Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mendapat pelayanan kesehatan** **Persentase orang terduga Tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan** **Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) mendapat pelayanan Kesehatan** **AVLOS (Average Length of Stay) Rumah sakit;** **Persentase SPM Rumah Sakit yang mencapai target**	**100** **100** **100** **100** **87,50**	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar Persentase pelaksanaan fungsi Labkesda Tingkat Kab/Kota sesuai standar	100 83,33	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan Kesehatan Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan Persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan Persentase diabetes mendapat pelayanan kesehatan Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mendapat pelayanan kesehatan Persentase orang terduga Tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	97,90 96,88 97,83 98,51 99,94 87 100 100 100 100 100 100	

					mendapat pelayanan Kesehatan Persentase hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Cakupan UHC	103,04	
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas menggunakan Sistem Informasi Terintegrasi	100	
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan Terakreditasi	100	
2		**Indeks Kepuasan masyarakat RS**	**91,11**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Persentase Puskesmas memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai standar (Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Kesmas, Kesling, Gizi, Analis Kesehatan dan Kefarmasian) sesuai standar** **Indeks Kepuasan Masyarakat Rumah Sakit**	**100** **91,11**	
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas memiliki Sumberdaya Manusia Kesehatan (SDMK) sesuai standar	100	
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas memiliki kompetensi sesuai dengan standar telah memiliki sertifikat uji kompentensi	102,16	
3				**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Makanan yang memenuhi syarat dan ketentuan**	**100**	
				Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) sesuai standar dan persyaratan	100	
				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT yang sudah kaji	100	
				Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	100	

				Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang memenuhi syarat dan ketentuan	100	
4				**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**Persentase Kelurahan denganminimal 80% posyandu aktif**	**100**	
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pedoman/ regulasi/ rekomendasi kebijakan penerapan Germas	100	
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan yang menerapkan Kebijakan Germas Persentase Rumah tangga berBPHS	100 100	
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan dengan minimal 80% posyandu aktif	100	
5	**Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan**	**97,87**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan**	**97,87**	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	99,12	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100	
				Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100	

B. Realisasi Anggaran

Secara umum Dinas Kesehatan Kota Batam telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Kesehatan Kota Batam Tahun 2021-2026 sebanyak 2 sasaran.

Tabel 3.10
Distribusi Realisasi Alokasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Batam
Tahun 2024

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
OPD DINAS KESEHATAN			**525,054,617,979.00**	**492,228,744,232.00**	**93.75%**
DINAS KESEHATAN			**274,913,469,865.00**	**260,376,486,383.00**	**94.71%**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**179,658,592,031.00**	**174,958,227,716.00**	**97.38%**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**81,100,000.00**	**34,861,000.00**	**42.99%**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12,988,000.00	12,845,000.00	98.90%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	56,760,000.00	11,008,000.00	19.39%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11,352,000.00	11,008,000.00	96.97%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**167,112,175,257.00**	**163,358,962,250.00**	**97.75%**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	167,112,175,257.00	163,358,962,250.00	97.75%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**1,066,259,460.00**	**914,604,912.00**	**85.78%**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14,796,710.00	8,401,000.00	56.78%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	836,804,300.00	756,939,000.00	90.46%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60,509,450.00	50,034,950.00	82.69%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154,149,000.00	99,229,962.00	64.37%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**267,246,416.00**	**262,348,416.00**	**98.17%**
		Pengadaan Mebel	24,910,000.00	24,500,000.00	98.35%
		Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	107,836,000.00	103,348,000.00	95.84%
		Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	134,500,416.00	134,500,416.00	100.00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**10,438,415,898.00**	**9,773,152,261.00**	**93.63%**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3,911,091,922.00	3,601,724,853.00	92.09%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6,527,323,976.00	6,171,427,408.00	94.55%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**693,395,000.00**	**614,298,877.00**	**88.59%**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	87,080,000.00	66,770,800.00	76.68%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	218,250,000.00	167,646,200.00	76.81%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47,810,000.00	42,350,000.00	88.58%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	340,255,000.00	337,531,877.00	99.20%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			**92,674,676,834.00**	**83,091,484,129.00**	**89.66%**

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		**30,157,915,510.00**	**26,022,031,614.00**	**86.29%**
		Pembangunan Puskesmas	7,661,363,000.00	6,009,670,296.00	78.44%
		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3,084,165,360.00	2,913,879,875.00	94.48%
		Pengembangan Puskesmas	6,319,815,292.00	6,217,503,712.00	98.38%
		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2,087,067,000.00	1,981,320,000.00	94.93%
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	553,269,200.00	454,769,976.00	82.20%
		Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	130,299,400.00	128,579,988.00	98.68%
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	682,777,936.00	672,300,845.00	98.47%
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	242,260,000.00	218,754,200.00	90.30%
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	9,396,898,322.00	7,425,252,722.00	79.02%
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**62,256,410,324.00**	**56,821,441,940.00**	**91.27%**
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	202,296,800.00	149,308,000.00	73.81%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3,960,000.00	3,840,000.00	96.97%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	42,240,000.00	41,968,000.00	99.36%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	31,240,000.00	30,369,100.00	97.21%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5,280,000.00	5,120,000.00	96.97%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	199,880,000.00	193,880,000.00	97.00%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	249,665,000.00	-	0.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	19,576,000.00	19,576,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1,188,374,400.00	1,139,176,000.00	95.86%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	28,556,000.00	28,428,000.00	99.55%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4,843,460,140.00	4,768,225,359.00	98.45%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	550,080,000.00	386,804,869.00	70.32%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	540,818,000.00	185,212,000.00	34.25%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	665,300,000.00	599,369,360.00	90.09%
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	309,223,500.00	279,433,228.00	90.37%
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	199,438,000.00	157,020,000.00	78.73%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	38,436,000.00	33,232,000.00	86.46%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Dan Napza	90,529,700.00	88,058,100.00	97.27%
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4,092,106,760.00	3,012,049,761.00	73.61%
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	46,708,219,524.00	43,639,040,391.00	93.43%
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	62,712,000.00	42,993,125.00	68.56%
		Penyelenggaraan Kabupaten/kota Sehat	93,085,500.00	57,498,000.00	61.77%
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	100.00%
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	9,265,000.00	8,470,000.00	91.42%
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	29,480,000.00	25,566,444.00	86.72%
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	358,208,000.00	307,498,438.00	85.84%
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	467,392,000.00	394,075,765.00	84.31%
		Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	21,088,000.00	18,830,000.00	89.29%
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu Dan Anak	6,500,000.00	6,400,000.00	98.46%
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		**166,335,000.00**	**164,980,000.00**	**99.19%**
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	166,335,000.00	164,980,000.00	99.19%
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**94,016,000.00**	**83,030,575.00**	**88.32%**
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, Ddan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	35,780,000.00	31,083,624.00	86.87%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
		Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3,168,000.00	3,072,000.00	96.97%
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	52,098,000.00	45,994,951.00	88.29%
		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	2,970,000.00	2,880,000.00	96.97%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			**809,120,000.00**	**732,722,538.00**	**90.56%**
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		**134,192,000.00**	**127,744,000.00**	**95.19%**
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	134,192,000.00	127,744,000.00	95.19%
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**674,928,000.00**	**604,978,538.00**	**89.64%**
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	674,928,000.00	604,978,538.00	89.64%
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			**1,002,098,000.00**	**873,341,000.00**	**87.15%**
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		**63,730,000.00**	**62,007,000.00**	**97.30%**

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko AlatKesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	63,730,000.00	62,007,000.00	97.30%
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		**246,387,000.00**	**235,172,000.00**	**95.45%**
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	246,387,000.00	235,172,000.00	95.45%
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		**498,467,000.00**	**486,202,000.00**	**97.54%**
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	498,467,000.00	486,202,000.00	97.54%
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		**193,514,000.00**	**89,960,000.00**	**46.49%**
		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	193,514,000.00	89,960,000.00	46.49%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			**768,983,000.00**	**720,711,000.00**	**93.72%**
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**387,757,000.00**	**353,284,500.00**	**91.11%**
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	387,757,000.00	353,284,500.00	91.11%
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**269,075,000.00**	**258,078,000.00**	**95.91%**
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	269,075,000.00	258,078,000.00	95.91%
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**112,151,000.00**	**109,348,500.00**	**97.50%**
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM)	112,151,000.00	109,348,500.00	97.50%
INSTALASI FARMASI			**506,977,250.00**	**482,152,500.00**	**95.10%**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**278,762,250.00**	**270,434,500.00**	**97.01%**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**10,912,250.00**	**9,635,500.00**	**88.30%**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	134,000.00	132,000.00	98.51%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9,088,250.00	7,890,500.00	86.82%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	500,000.00	500,000.00	100.00%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1,190,000.00	1,113,000.00	93.53%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**177,450,000.00**	**171,400,000.00**	**96.59%**
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	177,450,000.00	171,400,000.00	96.59%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**90,400,000.00**	**89,399,000.00**	**98.89%**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76,980,000.00	76,199,000.00	98.99%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13,420,000.00	13,200,000.00	98.36%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			**228,215,000.00**	**211,718,000.00**	**92.77%**
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		**178,215,000.00**	**166,718,000.00**	**93.55%**
		Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	108,015,000.00	96,518,000.00	89.36%
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	70,200,000.00	70,200,000.00	100.00%
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**50,000,000.00**	**45,000,000.00**	**90.00%**
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	50,000,000.00	45,000,000.00	90.00%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
BALOI PERMAI			**3,447,808,564.00**	**2,920,711,355.00**	**84.71%**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**2,330,459,564.00**	**1,864,248,488.00**	**79.99%**
	Peningkatan Pelayanan BLUD		**2,330,459,564.00**	**1,864,248,488.00**	**79.99%**
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2,330,459,564.00	1,864,248,488.00	79.99%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			**1,117,349,000.00**	**1,056,462,867.00**	**94.55%**
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**1,117,349,000.00**	**1,056,462,867.00**	**94.55%**
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	20,800,000.00	19,360,000.00	93.08%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	16,500,000.00	15,000,000.00	90.91%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	47,190,000.00	47,190,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6,600,000.00	6,600,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2,200,000.00	2,200,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	508,017,800.00	482,776,000.00	95.03%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7,700,000.00	7,700,000.00	100.00%
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	45,760,000.00	43,540,000.00	95.15%
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	160,490,000.00	160,490,000.00	100.00%
		Operasional Pelayanan Puskesmas	196,555,200.00	169,406,867.00	86.19%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12,276,000.00	11,340,000.00	92.38%
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Dan Pemberian Obat Massal)	220,000.00	220,000.00	100.00%
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3,300,000.00	3,300,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Hiv (Odhiv)	660,000.00	660,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	29,700,000.00	29,700,000.00	100.00%
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu Dan Anak	59,380,000.00	56,980,000.00	95.96%
BATU AJI			**2,971,629,248.00**	**2,723,427,229.00**	**91.65%**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**1,939,650,248.00**	**1,735,334,831.00**	**89.47%**
	Peningkatan Pelayanan BLUD		**1,939,650,248.00**	**1,735,334,831.00**	**89.47%**
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1,939,650,248.00	1,735,334,831.00	89.47%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			**1,026,699,000.00**	**982,842,398.00**	**95.73%**
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**1,026,699,000.00**	**982,842,398.00**	**95.73%**
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	28,560,000.00	27,120,000.00	94.96%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8,712,000.00	8,058,000.00	92.49%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	43,560,000.00	40,480,000.00	92.93%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	20,680,000.00	20,680,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3,960,000.00	3,960,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	501,032,000.00	498,416,000.00	99.48%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	18,844,000.00	18,550,000.00	98.44%
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	35,552,000.00	32,178,000.00	90.51%
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	90,756,000.00	84,790,000.00	93.43%
		Operasional Pelayanan Puskesmas	177,297,000.00	156,230,398.00	88.12%
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8,910,000.00	6,480,000.00	72.73%
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Dan Pemberian Obat Massal)	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	5,816,000.00	5,280,000.00	90.78%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Hiv (Odhiv)	2,200,000.00	2,200,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	5,280,000.00	5,280,000.00	100.00%
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu Dan Anak	74,440,000.00	72,040,000.00	96.78%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			**5,280,000.00**	**5,250,000.00**	**99.43%**
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**5,280,000.00**	**5,250,000.00**	**99.43%**
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5,280,000.00	5,250,000.00	99.43%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
BELAKANG PADANG			**1,932,154,906.00**	**1,689,379,671.00**	**87.44%**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**1,473,772,366.00**	**1,259,285,835.00**	**85.45%**
	Peningkatan Pelayanan BLUD		**1,473,772,366.00**	**1,259,285,835.00**	**85.45%**
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1,473,772,366.00	1,259,285,835.00	85.45%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			**427,962,040.00**	**400,506,336.00**	**93.58%**
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**427,962,040.00**	**400,506,336.00**	**93.58%**
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	16,140,000.00	16,140,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	13,186,800.00	12,330,000.00	93.50%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	17,740,000.00	17,740,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	15,240,000.00	15,240,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	40,328,600.00	33,776,075.00	83.75%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7,620,000.00	4,400,000.00	57.74%
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100,521,940.00	90,941,970.00	90.47%
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	73,300,000.00	73,300,000.00	100.00%
		Operasional Pelayanan Puskesmas	96,764,700.00	89,518,291.00	92.51%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	1,320,000.00	1,320,000.00	100.00%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu Dan Anak	45,800,000.00	45,800,000.00	100.00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			**30,420,500.00**	**29,587,500.00**	**97.26%**
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**30,420,500.00**	**29,587,500.00**	**97.26%**
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	30,420,500.00	29,587,500.00	97.26%
BOTANIA			**2,617,778,658.00**	**2,183,468,121.40**	**83.41%**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**1,820,731,658.00**	**1,536,902,560.40**	**84.41%**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**36,990,000.00**	**36,990,000.00**	**100.00%**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36,990,000.00	36,990,000.00	100.00%
	Peningkatan Pelayanan BLUD		**1,783,741,658.00**	**1,499,912,560.40**	**84.09%**
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1,783,741,658.00	1,499,912,560.40	84.09%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			**797,047,000.00**	**646,565,561.00**	**81.12%**
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**797,047,000.00**	**646,565,561.00**	**81.12%**

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	9,400,000.00	9,200,000.00	97.87%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	56,320,000.00	53,900,000.00	95.70%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9,900,000.00	9,900,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	290,871,000.00	197,348,561.00	67.85%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3,300,000.00	3,300,000.00	100.00%
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	36,300,000.00	31,820,000.00	87.66%
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	153,780,000.00	133,320,000.00	86.70%
		Operasional Pelayanan Puskesmas	150,816,000.00	123,987,000.00	82.21%
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6,450,000.00	6,390,000.00	99.07%
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	440,000.00	440,000.00	100.00%
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	2,200,000.00	2,200,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	2,640,000.00	2,420,000.00	91.67%
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu Dan Anak	74,630,000.00	72,340,000.00	96.93%
BULANG			**1,561,550,699.00**	**1,443,282,405.00**	**92.43%**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**976,888,339.00**	**869,677,545.00**	**89.03%**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**104,212,350.00**	**96,101,500.00**	**92.22%**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	25,133,730.00	22,270,000.00	88.61%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
		Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	79,078,620.00	73,831,500.00	93.36%
	Peningkatan Pelayanan BLUD		**872,675,989.00**	**773,576,045.00**	**88.64%**
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	872,675,989.00	773,576,045.00	88.64%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			**579,592,360.00**	**568,534,860.00**	**98.09%**
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**579,592,360.00**	**568,534,860.00**	**98.09%**
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	24,660,000.00	24,660,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	555,000.00	520,000.00	93.69%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	103,100,000.00	103,100,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	29,490,000.00	29,490,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	31,620,800.00	27,979,500.00	88.48%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6,220,000.00	6,220,000.00	100.00%
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	22,539,040.00	20,700,000.00	91.84%
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	93,030,000.00	93,030,000.00	100.00%
		Operasional Pelayanan Puskesmas	116,386,240.00	110,935,360.00	95.32%
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2,491,280.00	2,400,000.00	96.34%
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1,150,000.00	1,150,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Hiv (Odhiv)	8,550,000.00	8,550,000.00	100.00%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu Dan Anak	139,800,000.00	139,800,000.00	100.00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			**5,070,000.00**	**5,070,000.00**	**100.00%**
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**5,070,000.00**	**5,070,000.00**	**100.00%**
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5,070,000.00	5,070,000.00	100.00%
GALANG			**1,637,546,005.00**	**1,310,968,320.00**	**80.06%**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**1,038,605,005.00**	**812,100,192.00**	**78.19%**
	Peningkatan Pelayanan BLUD		**1,038,605,005.00**	**812,100,192.00**	**78.19%**
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1,038,605,005.00	812,100,192.00	78.19%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			**592,781,000.00**	**498,868,128.00**	**84.16%**
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**592,781,000.00**	**498,868,128.00**	**84.16%**
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	41,745,000.00	41,466,000.00	99.33%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	26,090,000.00	26,090,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	23,060,000.00	23,060,000.00	100.00%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	53,594,400.00	-	0.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10,760,000.00	10,760,000.00	100.00%
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	13,434,000.00	12,366,000.00	92.05%
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	132,180,000.00	128,880,000.00	97.50%
		Operasional Pelayanan Puskesmas	119,967,600.00	84,586,128.00	70.51%
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	20,540,000.00	20,540,000.00	100.00%
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu Dan Anak	151,410,000.00	151,120,000.00	99.81%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			**6,160,000.00**	**-**	**0.00%**
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**6,160,000.00**	**-**	**0.00%**
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6,160,000.00	-	0.00%
KABIL			**1,868,613,708.00**	**1,715,489,130.00**	**91.81%**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**1,225,165,708.00**	**1,110,012,330.00**	**90.60%**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**36,990,000.00**	**36,402,000.00**	**98.41%**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36,990,000.00	36,402,000.00	98.41%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
	Peningkatan Pelayanan BLUD		**1,188,175,708.00**	**1,073,610,330.00**	**90.36%**
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1,188,175,708.00	1,073,610,330.00	90.36%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			**643,448,000.00**	**605,476,800.00**	**94.10%**
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**643,448,000.00**	**605,476,800.00**	**94.10%**
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	11,320,000.00	11,080,000.00	97.88%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2,825,000.00	2,800,000.00	99.12%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	39,500,000.00	39,500,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9,680,000.00	9,680,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	177,117,200.00	169,851,800.00	95.90%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12,250,000.00	12,250,000.00	100.00%
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	21,712,000.00	21,140,000.00	97.37%
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	126,900,000.00	122,960,000.00	96.90%
		Operasional Pelayanan Puskesmas	129,988,800.00	113,589,000.00	87.38%
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3,135,000.00	2,046,000.00	65.26%
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	440,000.00	440,000.00	100.00%
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	6,160,000.00	6,160,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	5,310,000.00	5,310,000.00	100.00%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu Dan Anak	97,110,000.00	88,670,000.00	91.31%
KAMPUNG JABI			**1,347,110,990.00**	**1,185,461,124.00**	**88.00%**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**699,921,990.00**	**602,841,124.00**	**86.13%**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**38,990,000.00**	**36,590,900.00**	**93.85%**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38,990,000.00	36,590,900.00	93.85%
	Peningkatan Pelayanan BLUD		**660,931,990.00**	**566,250,224.00**	**85.67%**
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	660,931,990.00	566,250,224.00	85.67%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			**643,009,000.00**	**578,490,000.00**	**89.97%**
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**643,009,000.00**	**578,490,000.00**	**89.97%**
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	8,320,000.00	8,128,000.00	97.69%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8,250,000.00	6,500,000.00	78.79%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	26,840,000.00	26,840,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	19,800,000.00	19,800,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2,200,000.00	2,200,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	159,358,000.00	136,354,000.00	85.56%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11,110,000.00	11,110,000.00	100.00%
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	28,848,000.00	24,880,000.00	86.25%
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	134,750,000.00	127,270,000.00	94.45%
		Operasional Pelayanan Puskesmas	135,668,000.00	110,652,000.00	81.56%
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7,665,000.00	5,066,000.00	66.09%
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	4,950,000.00	4,950,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Hiv (Odhiv)	880,000.00	880,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	22,220,000.00	22,220,000.00	100.00%
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu Dan Anak	71,050,000.00	70,540,000.00	99.28%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			**4,180,000.00**	**4,130,000.00**	**98.80%**
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**4,180,000.00**	**4,130,000.00**	**98.80%**
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4,180,000.00	4,130,000.00	98.80%
LUBUK BAJA			**3,125,741,389.00**	**2,872,090,381.00**	**91.89%**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**2,211,032,389.00**	**2,060,384,781.00**	**93.19%**

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
	Peningkatan Pelayanan BLUD		**2,211,032,389.00**	**2,060,384,781.00**	**93.19%**
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2,211,032,389.00	2,060,384,781.00	93.19%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			**912,949,000.00**	**809,945,600.00**	**88.72%**
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**912,949,000.00**	**809,945,600.00**	**88.72%**
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	13,200,000.00	13,200,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	16,500,000.00	16,000,000.00	96.97%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	75,570,000.00	75,570,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	4,400,000.00	4,400,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	329,842,600.00	248,959,600.00	75.48%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	21,120,000.00	21,120,000.00	100.00%
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	88,968,000.00	86,832,000.00	97.60%
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	147,290,000.00	143,990,000.00	97.76%
		Operasional Pelayanan Puskesmas	174,478,400.00	158,494,000.00	90.84%
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6,270,000.00	6,180,000.00	98.56%
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	110,000.00	-	0.00%
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	880,000.00	880,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	2,420,000.00	2,420,000.00	100.00%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu Dan Anak	31,900,000.00	31,900,000.00	100.00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			**1,760,000.00**	**1,760,000.00**	**100.00%**
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**1,760,000.00**	**1,760,000.00**	**100.00%**
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1,760,000.00	1,760,000.00	100.00%
MENTARAU			**1,611,134,001.00**	**1,460,503,948.60**	**90.65%**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**855,903,001.00**	**758,895,330.60**	**88.67%**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**38,990,000.00**	**36,317,900.00**	**93.15%**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38,990,000.00	36,317,900.00	93.15%
	Peningkatan Pelayanan BLUD		**816,913,001.00**	**722,577,430.60**	**88.45%**
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	816,913,001.00	722,577,430.60	88.45%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			**755,231,000.00**	**701,608,618.00**	**92.90%**
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**755,231,000.00**	**701,608,618.00**	**92.90%**

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	15,040,000.00	14,720,000.00	97.87%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	55,660,000.00	55,660,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	19,800,000.00	19,800,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	152,259,200.00	135,139,200.00	88.76%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10,560,000.00	10,560,000.00	100.00%
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	39,380,000.00	32,920,000.00	83.60%
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	148,060,000.00	147,840,000.00	99.85%
		Operasional Pelayanan Puskesmas	156,511,800.00	147,689,418.00	94.36%
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6,120,000.00	4,740,000.00	77.45%
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	440,000.00	220,000.00	50.00%
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	17,600,000.00	17,600,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	4,180,000.00	4,180,000.00	100.00%
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu Dan Anak	129,620,000.00	110,540,000.00	85.28%
REMPANG CATE			**834,596,922.00**	**778,276,013.00**	**93.25%**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**388,226,922.00**	**365,220,064.00**	**94.07%**
	Peningkatan Pelayanan BLUD		**388,226,922.00**	**365,220,064.00**	**94.07%**
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	388,226,922.00	365,220,064.00	94.07%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			**430,592,000.00**	**397,493,949.00**	**92.31%**
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**430,592,000.00**	**397,493,949.00**	**92.31%**
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	9,440,000.00	9,280,000.00	98.31%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	11,102,000.00	6,298,000.00	56.73%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	18,360,000.00	18,360,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	880,000.00	880,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	59,679,600.00	58,516,000.00	98.05%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5,560,000.00	5,560,000.00	100.00%
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	32,040,000.00	27,120,000.00	84.64%
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	95,260,000.00	93,940,000.00	98.61%
		Operasional Pelayanan Puskesmas	110,740,400.00	93,479,949.00	84.41%
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	220,000.00	-	0.00%
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	9,520,000.00	9,520,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	9,390,000.00	9,240,000.00	98.40%
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu Dan Anak	68,400,000.00	65,300,000.00	95.47%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			**15,778,000.00**	**15,562,000.00**	**98.63%**
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**15,778,000.00**	**15,562,000.00**	**98.63%**
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	15,778,000.00	15,562,000.00	98.63%
SAMBAU			**1,200,493,805.00**	**1,083,396,327.00**	**90.25%**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**673,582,805.00**	**613,465,086.00**	**91.07%**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**36,990,000.00**	**33,274,000.00**	**89.95%**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36,990,000.00	33,274,000.00	89.95%
	Peningkatan Pelayanan BLUD		**636,592,805.00**	**580,191,086.00**	**91.14%**
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	636,592,805.00	580,191,086.00	91.14%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			**526,911,000.00**	**469,931,241.00**	**89.19%**
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**526,911,000.00**	**469,931,241.00**	**89.19%**
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	12,480,000.00	11,904,000.00	95.38%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	12,320,000.00	12,320,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12,100,000.00	12,100,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	128,688,600.00	111,454,000.00	86.61%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	18,700,000.00	18,700,000.00	100.00%
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	28,908,000.00	26,578,000.00	91.94%
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	98,340,000.00	95,150,000.00	96.76%
		Operasional Pelayanan Puskesmas	118,499,400.00	97,492,241.00	82.27%
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2,580,000.00	1,028,000.00	39.84%
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Dan Pemberian Obat Massal)	440,000.00	-	0.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	11,000,000.00	10,120,000.00	92.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Hiv (Odhiv)	3,080,000.00	3,080,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	3,080,000.00	3,080,000.00	100.00%
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu Dan Anak	76,695,000.00	66,925,000.00	87.26%
SEI LANGKAI			**3,011,231,246.00**	**2,378,291,477.00**	**78.98%**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**2,196,628,246.00**	**1,728,675,899.00**	**78.70%**
	Peningkatan Pelayanan BLUD		**2,196,628,246.00**	**1,728,675,899.00**	**78.70%**
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2,196,628,246.00	1,728,675,899.00	78.70%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			**814,603,000.00**	**649,615,578.00**	**79.75%**
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**814,603,000.00**	**649,615,578.00**	**79.75%**
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	19,560,000.00	19,200,000.00	98.16%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	9,900,000.00	9,600,000.00	96.97%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	78,100,000.00	72,160,000.00	92.39%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8,800,000.00	8,800,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3,520,000.00	3,520,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	235,391,400.00	130,755,000.00	55.55%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8,800,000.00	8,800,000.00	100.00%
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	16,588,000.00	14,632,000.00	88.21%
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	161,040,000.00	158,950,000.00	98.70%
		Operasional Pelayanan Puskesmas	158,343,600.00	136,408,578.00	86.15%
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7,740,000.00	2,230,000.00	28.81%
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	660,000.00	660,000.00	100.00%
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3,300,000.00	3,300,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	5,280,000.00	5,280,000.00	100.00%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu Dan Anak	97,580,000.00	75,320,000.00	77.19%
SEI LEKOP			**2,539,670,762.00**	**2,279,590,121.00**	**89.76%**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**1,779,909,912.00**	**1,617,656,421.00**	**90.88%**
	Peningkatan Pelayanan BLUD		**1,779,909,912.00**	**1,617,656,421.00**	**90.88%**
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1,779,909,912.00	1,617,656,421.00	90.88%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			**759,760,850.00**	**661,933,700.00**	**87.12%**
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**759,760,850.00**	**661,933,700.00**	**87.12%**
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	13,560,000.00	13,320,000.00	98.23%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	85,800,000.00	85,800,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6,600,000.00	6,600,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	187,875,600.00	118,260,000.00	62.95%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12,100,000.00	12,100,000.00	100.00%
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	13,200,000.00	12,550,000.00	95.08%
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	170,060,000.00	170,060,000.00	100.00%
		Operasional Pelayanan Puskesmas	156,345,250.00	132,137,700.00	84.52%
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3,360,000.00	966,000.00	28.75%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	880,000.00	880,000.00	100.00%
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	2,200,000.00	2,200,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	5,720,000.00	5,720,000.00	100.00%
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu Dan Anak	102,060,000.00	101,340,000.00	99.29%
SEI PANCUR			**3,071,908,510.00**	**2,028,895,944.00**	**66.05%**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**2,286,578,510.00**	**1,409,418,412.00**	**61.64%**
	Peningkatan Pelayanan BLUD		**2,286,578,510.00**	**1,409,418,412.00**	**61.64%**
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2,286,578,510.00	1,409,418,412.00	61.64%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			**785,330,000.00**	**619,477,532.00**	**78.88%**
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**785,330,000.00**	**619,477,532.00**	**78.88%**
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	33,320,000.00	27,530,000.00	82.62%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	19,580,000.00	10,120,000.00	51.69%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3,960,000.00	3,960,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	232,133,000.00	228,767,000.00	98.55%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7,700,000.00	7,700,000.00	100.00%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	118,250,000.00	113,310,000.00	95.82%
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	156,640,000.00	133,430,000.00	85.18%
		Operasional Pelayanan Puskesmas	151,387,000.00	45,280,532.00	29.91%
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	10,560,000.00	7,000,000.00	66.29%
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	440,000.00	440,000.00	100.00%
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3,960,000.00	3,960,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	8,800,000.00	6,490,000.00	73.75%
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu Dan Anak	38,600,000.00	31,490,000.00	81.58%
SEKUPANG			**2,614,740,510.00**	**2,442,146,603.00**	**93.40%**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**1,885,982,510.00**	**1,765,898,361.00**	**93.63%**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**20,779,557.00**	**20,779,557.00**	**100.00%**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	20,779,557.00	20,779,557.00	100.00%
	Peningkatan Pelayanan BLUD		**1,865,202,953.00**	**1,745,118,804.00**	**93.56%**
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1,865,202,953.00	1,745,118,804.00	93.56%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			**722,343,000.00**	**670,008,242.00**	**92.75%**

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**722,343,000.00**	**670,008,242.00**	**92.75%**
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	22,560,000.00	22,080,000.00	97.87%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	22,440,000.00	21,760,000.00	96.97%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	51,040,000.00	49,060,000.00	96.12%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10,560,000.00	10,560,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	17,600,000.00	17,600,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	162,550,800.00	157,300,800.00	96.77%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7,040,000.00	7,040,000.00	100.00%
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	56,540,000.00	49,940,000.00	88.33%
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	137,020,000.00	132,510,000.00	96.71%
		Operasional Pelayanan Puskesmas	148,800,200.00	119,839,442.00	80.54%
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6,072,000.00	4,998,000.00	82.31%
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	10,560,000.00	10,560,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	17,380,000.00	15,840,000.00	91.14%
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu Dan Anak	52,180,000.00	50,920,000.00	97.59%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			**6,415,000.00**	**6,240,000.00**	**97.27%**

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**6,415,000.00**	**6,240,000.00**	**97.27%**
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6,415,000.00	6,240,000.00	97.27%
SUNGAI PANAS			**3,180,345,706.00**	**2,378,084,353.00**	**74.77%**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**2,428,516,706.00**	**1,799,400,817.00**	**74.09%**
	Peningkatan Pelayanan BLUD		**2,428,516,706.00**	**1,799,400,817.00**	**74.09%**
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2,428,516,706.00	1,799,400,817.00	74.09%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			**739,069,000.00**	**568,093,536.00**	**76.87%**
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**739,069,000.00**	**568,093,536.00**	**76.87%**
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	8,400,000.00	8,064,000.00	96.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3,265,000.00	3,240,000.00	99.23%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	38,390,000.00	35,420,000.00	92.26%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3,520,000.00	3,520,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	233,356,400.00	144,898,000.00	62.09%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10,010,000.00	6,490,000.00	64.84%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	22,290,000.00	18,070,000.00	81.07%
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular	142,340,000.00	138,380,000.00	97.22%
		Operasional Pelayanan Puskesmas	147,222,600.00	115,769,536.00	78.64%
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4,935,000.00	3,686,000.00	74.69%
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Dan Pemberian Obat Massal)	220,000.00	220,000.00	100.00%
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	10,560,000.00	10,560,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	9,240,000.00	8,976,000.00	97.14%
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu Dan Anak	105,320,000.00	70,800,000.00	67.22%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			**12,760,000.00**	**10,590,000.00**	**82.99%**
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**12,760,000.00**	**10,590,000.00**	**82.99%**
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12,760,000.00	10,590,000.00	82.99%
TANJUNG BUNTUNG			**1,649,789,309.00**	**1,541,048,084.00**	**93.41%**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**1,075,400,309.00**	**987,313,718.00**	**91.81%**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**36,990,000.00**	**33,530,000.00**	**90.65%**

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36,990,000.00	33,530,000.00	90.65%
	Peningkatan Pelayanan Blud		**1,038,410,309.00**	**953,783,718.00**	**91.85%**
		Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan Blud	1,038,410,309.00	953,783,718.00	91.85%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			**574,389,000.00**	**553,734,366.00**	**96.40%**
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**574,389,000.00**	**553,734,366.00**	**96.40%**
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	16,640,000.00	15,872,000.00	95.38%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	25,080,000.00	25,080,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11,440,000.00	11,440,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	106,565,200.00	104,500,000.00	98.06%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9,130,000.00	9,130,000.00	100.00%
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	37,034,000.00	36,120,000.00	97.53%
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	130,900,000.00	130,240,000.00	99.50%
		Operasional Pelayanan Puskesmas	126,464,800.00	112,297,366.00	88.80%
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5,415,000.00	4,775,000.00	88.18%
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1,760,000.00	1,760,000.00	100.00%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	10,560,000.00	10,560,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Hiv (Odhiv)	880,000.00	880,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	6,380,000.00	6,380,000.00	100.00%
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu Dan Anak	85,040,000.00	83,600,000.00	98.31%
TANJUNG SENGKUANG			**2,745,323,661.00**	**2,164,064,966.00**	**78.83%**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**2,063,127,661.00**	**1,531,482,129.00**	**74.23%**
	Peningkatan Pelayanan BLUD		**2,063,127,661.00**	**1,531,482,129.00**	**74.23%**
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2,063,127,661.00	1,531,482,129.00	74.23%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			**677,946,000.00**	**628,382,837.00**	**92.69%**
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**677,946,000.00**	**628,382,837.00**	**92.69%**
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	18,240,000.00	17,792,000.00	97.54%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	51,040,000.00	45,650,000.00	89.44%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5,500,000.00	5,500,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	8,800,000.00	8,800,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	174,954,400.00	164,184,400.00	93.84%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20,460,000.00	20,460,000.00	100.00%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	62,700,000.00	60,710,000.00	96.83%
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	115,610,000.00	114,950,000.00	99.43%
		Operasional Pelayanan Puskesmas	139,234,600.00	112,886,437.00	81.08%
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7,287,000.00	5,250,000.00	72.05%
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	660,000.00	660,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	9,240,000.00	9,000,000.00	97.40%
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu Dan Anak	64,220,000.00	62,540,000.00	97.38%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			**4,250,000.00**	**4,200,000.00**	**98.82%**
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**4,250,000.00**	**4,200,000.00**	**98.82%**
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4,250,000.00	4,200,000.00	98.82%
TANJUNG UNCANG			**1,506,554,194.00**	**1,448,632,075.00**	**96.16%**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**672,167,194.00**	**636,165,076.00**	**94.64%**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**36,990,000.00**	**28,469,000.00**	**76.96%**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36,990,000.00	28,469,000.00	76.96%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
	Peningkatan Pelayanan BLUD		**635,177,194.00**	**607,696,076.00**	**95.67%**
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	635,177,194.00	607,696,076.00	95.67%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			**834,387,000.00**	**812,466,999.00**	**97.37%**
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**834,387,000.00**	**812,466,999.00**	**97.37%**
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	23,800,000.00	22,600,000.00	94.96%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	34,980,000.00	34,980,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12,100,000.00	12,100,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	11,000,000.00	11,000,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	264,826,000.00	264,288,000.00	99.80%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12,320,000.00	13,640,000.00	110.71%
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	32,604,000.00	31,782,999.00	97.48%
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	142,738,000.00	140,758,000.00	98.61%
		Operasional Pelayanan Puskesmas	160,584,000.00	148,101,000.00	92.23%
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3,615,000.00	2,877,000.00	79.59%
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2,420,000.00	2,420,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Hiv (Odhiv)	2,200,000.00	2,200,000.00	100.00%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	26,420,000.00	24,940,000.00	94.40%
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu Dan Anak	104,780,000.00	100,780,000.00	96.18%
TIBAN BARU			**2,006,397,775.00**	**1,885,248,131.00**	**93.96%**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**1,230,505,525.00**	**1,152,948,657.00**	**93.70%**
	Peningkatan Pelayanan BLUD		**1,230,505,525.00**	**1,152,948,657.00**	**93.70%**
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1,230,505,525.00	1,152,948,657.00	93.70%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			**772,372,250.00**	**728,879,474.00**	**94.37%**
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**772,372,250.00**	**728,879,474.00**	**94.37%**
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	9,120,000.00	8,896,000.00	97.54%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	13,640,000.00	13,480,000.00	98.83%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	29,260,000.00	29,150,000.00	99.62%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	19,800,000.00	19,800,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	261,316,400.00	231,100,400.00	88.44%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10,340,000.00	10,340,000.00	100.00%
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	33,660,000.00	33,060,000.00	98.22%
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	128,700,000.00	128,700,000.00	100.00%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
		Operasional Pelayanan Puskesmas	150,327,850.00	140,325,074.00	93.35%
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7,458,000.00	6,702,000.00	89.86%
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1,320,000.00	1,320,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	11,550,000.00	11,550,000.00	100.00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	29,240,000.00	28,616,000.00	97.87%
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu Dan Anak	66,640,000.00	65,840,000.00	98.80%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			**3,520,000.00**	**3,420,000.00**	**97.16%**
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**3,520,000.00**	**3,420,000.00**	**97.16%**
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3,520,000.00	3,420,000.00	97.16%
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH			**203,422,700.00**	**165,422,000.00**	**81.32%**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**202,722,700.00**	**165,422,000.00**	**81.60%**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**29,236,700.00**	**22,672,000.00**	**77.55%**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,741,000.00	5,645,000.00	83.74%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,316,700.00	15,423,000.00	75.91%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2,179,000.00	1,604,000.00	73.61%

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**157,606,000.00**	**132,475,000.00**	**84.05%**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	66,706,000.00	56,250,000.00	84.33%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90,900,000.00	76,225,000.00	83.86%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**11,000,000.00**	**8,775,000.00**	**79.77%**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11,000,000.00	8,775,000.00	79.77%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**4,880,000.00**	**1,500,000.00**	**30.74%**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,880,000.00	1,500,000.00	30.74%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			**700,000.00**	**-**	**0.00%**
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota		**700,000.00**	**-**	**0.00%**
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	700,000.00	-	0.00%
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH			**202,948,627,596.00**	**191,292,227,570.00**	**94.26%**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**190,251,008,532.00**	**182,298,536,153.00**	**95.82%**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**78,046,034,650.00**	**75,066,854,014.00**	**96.18%**

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	78,046,034,650.00	75,066,854,014.00	96.18%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**2,108,131,500.00**	**2,107,081,070.00**	**99.95%**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	1,848,708,380.00	1,848,708,380.00	100.00%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	259,423,120.00	258,372,690.00	99.60%
	Peningkatan Pelayanan Blud		**110,096,842,382.00**	**105,124,601,069.00**	**95.48%**
		Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan Blud	110,096,842,382.00	105,124,601,069.00	95.48%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			**12,697,619,064.00**	**8,993,691,417.00**	**70.83%**
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		**12,697,619,064.00**	**8,993,691,417.00**	**70.83%**
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3,697,619,064.00	3,319,645,358.00	89.78%
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	9,000,000,000.00	5,674,046,059.00	63.04%

Tabel 3.11
Checklist Kelengkapan Data Pada Bab III
(Point Utama Penilaian LKjIP)

Indiakator	Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)	Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Indeks Kesehatan	√	√	√	X (karena memang tidak *benchmark* nasional)	√	√	√
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)	√	√	√	√	√	√	√
Angka Kematian Neonatus (AKN) per 1.000 Kelahiran Hidup (KH)	√	√	√	√	√	√	√
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup (KH)	√	√	√	√	√	√	√
Prevalensi Stunting pada Balita	√	√	√	√	√	√	√
Prevalensi Wasting pada Balita	√	√	√	√	√	√	√
Insidensi TB per 100.000 penduduk	√	√	√	√	√	√	√
Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada balita usia 12-23 bulan	√	√	√	√	√	√	√
Persentase Pencapaian SPM RS sesuai Standar	√	√	√	√	√	√	√
Bed of Rate (BOR) Rumah Sakit	√	√	√	√	√	√	√
Indeks Kepuasan masyarakat RS	√	√	√	X (karena memang tidak *benchmark* nasional)	√	√	√
Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	√	√	√	X (karena memang tidak *benchmark* nasional)	√	√	√

BAB IV PENUTUP

Laporan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dinas Kesehatan Kota Batam adalah suatu bentuk monitoring yang sangat penting untuk mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani pada tahun tersebut. Ini juga merupakan wujud pertanggungjawaban tertulis terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sesuai dengan prinsip Good Governance, yang menjadi landasan pelaksanaan Dinas Kesehatan Kota Batam pada tahun 2024.

Penyusunan laporan ini mencerminkan komitmen Dinas Kesehatan dalam memenuhi tuntutan dan harapan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan Capaian Kinerja Tahun 2024 ini menjadi alat yang efektif dalam membuktikan kinerja Dinas Kesehatan Kota Batam sebagai penerima amanah dari Kepala Daerah. Dengan mengevaluasi capaian kinerja program/kegiatan dan sasaran, serta menganalisis keberhasilan dan kegagalan, Dinas Kesehatan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kontribusi mereka dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan di Kota Batam.

Laporan ini diharapkan tidak hanya menjadi instrumen akuntabilitas, tetapi juga menjadi sumber informasi yang berharga untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang. Dengan demikian, Dinas Kesehatan Kota Batam dapat terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal dan berkelanjutan kepada masyarakat, sejalan dengan prinsip-prinsip *Good Governance*.

A. Tinjauan Umum Keberhasilan

Dinas Kesehatan Kota Batam sebagai Perangkat Daerah teknis yang mempunyaitugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan mempunyai fungsi merumuskan, merencanakan, melaksanakan program dan kegiatan di bidang kesehatan.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber daya dan sarana secara efektif dan efisien. Dengan memperhatikan uraian pada bab III, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, hal ini karena berdasarkan hasil pengukuran penetapan kinerja Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagian besar kinerja target sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik pada 4 indikator dan kurang dari target pada 1 indikator. Hasil pengukuran Indikator Kinerja dengan hasil sebagai berikut:

1. Hasil Pengukuran Indikator Dinas Kesehatan Kota Batam

   a. Indeks Kesehatan Tahun 2024 mencapai 83,65

   b. Angka Kematian Bayi melebihi target yang ditetapkan yakni 5,5 per 1000 kelahiran hidup

   c. Angka Kematian Ibu melebihi target yang ditetapkan yakni 72,58 per 100.000 kelahiran hidup

   d. Angka Kematian Neonatus melebihi target yang ditetapkan yakni 4,95 per 1000 kelahiran hidup

   e. Prevalensi Stunting Pada Balita dapat ditekan hingga menjadi 1,27 %

   f. Prevalensi Wasting Pada Balita dapat ditekan hingga menjadi 2,86 %

   g. Insidensi TB per 100.000 penduduk mencapai 389 per 100.000 penduduk

   h. Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada balita usia 12-23 bulan dapat dicapai 85%

   i. Persentase Pencapaian SPM RS sesuai Standar dapat dicapai 87,50%

   j. Bed of Rate (BOR) Rumah Sakit dapat dicapai 80,10%

k. Indeks Kepuasan masyarakat RS dapat dicapai 82%

2. Hasil Evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD dan APBD-P Tahun Anggaran 2024 Bulan Desember 2024, sebanyak 5 program, 21 kegiatan, 80 sub kegiatan dengan total pagu dana 525.054.617.979,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 489.720.207.325.- dan Belanja Modal Rp. 35.334.410.654,-. Hasil realisasi keuangan sebesar 93,75%(Rp. 492.228.744.232,00).

B. Permasalahan atau Kendala

Permasalahan atau kendala yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya:

1. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Neonatus (AKN) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan ANC sesuai standar di fasilitas kesehatan, sehingga deteksi dini kasus untuk mencegah terjadinya kematian tidak berjalan optimal. Selain itu, kurangnya keterampilan nakes dalam tata laksana gawat darurat maternal neonatal juga menjadi faktor tingginya AKI, AKN dan AKB.
2. Belum terpenuhinya sumber daya manusia kesehatan sesuai ketenagaan yang dibutuhkan baik jumlah dan kualitas khususnya Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) di Puskesmas baik *mainland* maupun *hinterland*;
3. Kurangnya tenaga administrasi di Puskesmas sehingga banyak tenaga kesehatan (perawat, bidan, sanitarian, analis kesehatan dan gizi) merangkap tugas administrasi (bendahara dan administrasi lain), sehingga tugas pokok sebagai tenaga fungsional kesehatan tidak optimal;
4. Sistem pencatatan dan pelaporan yang tidak optimal terutama dari fasilitas kesehatan swasta;
5. Belum optimalnya pencapaian lingkungan sehat, kota sehat dan pemukiman sehat;
6. Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan monitoring pelayanan kesehatan non pemerintah baik yang berizin atau belum,

pada pelayanan teknis medis maupun tradisional dan pada pelayanan primer maupun rujukan.

C. Strategi Pemecahan Masalah

Strategi yang diusulkan dalam mengatasi permasalahan tersebut mencakup berbagai aspek dan menunjukkan pendekatan komprehensif. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut untuk setiap strategi yang telah disebutkan:

1. Peningkatan Kompetensi Petugas

   Mengajukan usulan pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi petugas di Puskesmas

2. Pemenuhan Kebutuhan Tenaga

   Mengajukan usulan pegawai melalui Rencana Kebutuhan serta mendistribusikan pegawai secara merata ke seluruh Puskesmas di kota Batam

3. Penambahan Tenaga Administrasi (Keuangan)

   Mengajukan usulan penambahan tenaga administrasi, terutama di bidang keuangan, guna memperkuat manajemen administrasi di puskesmas.

4. Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor

   Meningkatkan koordinasi antarprogram dan lintas sektor dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan kesehatan untuk memastikan sinergi dan efisiensi.

5. Partisipasi Masyarakat

   Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui program Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat, menggandeng komunitas untuk terlibat aktif dalam pembangunan kesehatan.

6. Pemanfaatan Teknologi Informasi

   Meningkatkan koordinasi dan pembinaan dengan mitra kesehatan

untuk memperbaiki sistem informasi kesehatan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

7. Kegiatan Skrining dengan Melibatkan Komunitas

   Meningkatkan kegiatan skrining dengan melibatkan berbagai komunitas di masyarakat untuk deteksi dini dan pencegahan penyakit.

8. Promosi Kesehatan Melalui Media Penyuluhan

   Meningkatkan upaya promosi kesehatan dengan memanfaatkan strategi media penyuluhan untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

9. Kerjasama Lintas Program dan Sektor untuk Peningkatan Gizi

   Meningkatkan kerjasama lintas program dan sektor, serta melibatkan masyarakat dalam upaya peningkatan gizi melalui promosi kesehatan.

10. Koordinasi Lintas Sektor Program Kecamatan Sehat

    Meningkatkan koordinasi dan peran serta lintas sektor terkait dengan program kecamatan sehat untuk mencapai hasil yang lebih baik secara holistik.

11. Peningkatan Akses Sarana dan Prasarana

    Meningkatkan akses sarana dan prasarana kesehatan dengan fokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas, serta pemetaan kebutuhan masyarakat.

12. Pengembangan Media Informasi Elektronik

    Meningkatkan akses informasi kesehatan dengan mengembangkan media informasi elektronik, sehingga informasi dapat disampaikan secara efisien.

13. Pembinaan, Pengawasan, dan Monitoring Pelayanan Kesehatan

    Meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan monitoring pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan swasta dan tradisional untuk

memastikan standar pelayanan yang tinggi.

Dengan penerapan strategi ini, diharapkan Dinas Kesehatan Kota Batam dapat mengatasi permasalahan kesehatan dengan lebih efektif dan meraih capaian kinerja yang lebih baik.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2024 Dinas Kesehatan Kota Batam dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan untuk mempercepat terwujudnya pembangunan Kesehatan di Kota Batam, dan agar tercapai penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good government*) dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam lingkup Dinas Kesehatan Kota Batam sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah Kota Batam.